



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FUTURES KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

**Ekonomi Kreatif
Gelombang Perekonomian
Masa Depan**

**Peluang Merger
Pialang 'Kacuk'**

**APBI Membangun
Ditengah Masa Sulit**



Bappebti
Lintas 2008

PEMBACA yang budiman, orang pintar banyak bicara kalau yang abadi itu adalah perubahan. Maka, mungkin itu pulalah yang terjadi di hadapan anda saat ini. Bulletin Berjangka yang hadir sejak tahun 2001, ini, telah berkali-kali mengalami perubahan, baik fisik maupun tampilan. Tetapi yang jelas tujuan utama perubahan itu demi kenyamanan anda.



Perubahan tampilan Bulletin Berjangka kali ini, pertama, terjadi pada pencantuman logo Departemen Perdagangan di cover. Ini adalah pesanan khusus dari Sekjen Depdag, untuk keseragaman semua barang cetakan yang dikeluarkan Depdag.

Perubahan yang kedua, bulletin dicetak *full color*. Lagi-lagi perubahan ini demi kenyamanan para pembaca untuk lebih tertarik untuk memahami dan mendalami semua informasi yang tertera di Bulletin Berjangka.

Perubahan ketiga, atas Sidang Redaksi mencoba memangkas beberapa halaman rubrikasi dan memperkaya jumlah rubrikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menambah informasi yang lebih penting untuk diketahui para pembaca.

Seperti biasanya, atas perubahan-perubahan itu

tentunya Redaksi meminta dengan segala rendah hati saran dan masukan para pembaca. Tentunya saran dan masukan itu untuk kesempurnaan Bulletin Berjangka yang kita cintai ini dimasa-masa mendatang.

Edisi perdana Buletin Berjangka ditahun 2009, ini, mencoba mengulas kondisi pelaku usaha perdagangan berjangka ditengah ancaman krisis keuangan global. Untuk mengetahui hal tersebut, Redaksi mewawancarai Ketua APBI, I Gde Raka Tantra.

Dari bincang-bincang tersebut, terkuak pula sejumlah tantangan yang siap menghadang pelaku pasar perdagangan berjangka selama tahun 2009. Dimulai dari keluarnya peraturan syarat permodalan yang lebih tinggi, hingga peraturan perpajakan baru di bidang derivative.

Melihat kondisi sulit itu, ada keyakinan sementara ini jumlah perusahaan pialang berjangka akan menyusut.

Namun yang pasti, menurut I Gde Raka Tantra, munculnya peraturan yang serba ketat tersebut menuntut para pelaku pasar asah otak dan kreatif mencari peluang pasar. Serta yang terpenting, membuat industri ini lebih kredibel. Dan mampu menjadi salah satu sentra indicator perekonomian nasional.

Salam! ▲

5 LAPORAN UTAMA

APBI mebangun ditengah masa sulit



16 KOMODITI

Pohon Pinang
Menaungi Setra
Gandamayit



22 BERJANGKA

Program Penting BBJ 2009



Fokus8-9
 UU No. 32/1997 Tidak Kenal Tenaga Marketing

Market10
 Harga Gula Diprediksi Tinggi

Analisa 11
 Harga Komoditas Tambang Tak Lagi Bimbang

Aktualita 12-13
 Perdagangan Fisik beras belum diatur Keppres

Agenda Foto 14-15

Outlook 19-20
 Deflation Says Buy Bonds; Supply Flood Says Sell

Transaksi21

Wawasan 24-25
 Ekonomi Kreatif
 Gelombang Perekonomian Masa Depan

Kolom 26-27
 SRG Peluang dan Tantangan Bagi Bisnis Perbankan

foto cover : Deddy Saleh, Man Obsession



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Penasehat/Penanggung Jawab:** Deddy Saleh
Pemimpin Redaksi: Chrisnawan Triwahyuardhianto **Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi: Yusuf Affandi, Lili Yuliana S, Dian Sandita Arisanti, Suhendro, Ambre Satria P, Sri Sundayani, Poppy Juliyanti
Sirkulasi: Sapin Siswanto, Katimin **Alamat Redaksi:** Bumi Daya Plaza Lt. 4 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat
 Kotak Pos 1444. Telp (021) 3156315 (hunting), Fax. (021) 3156135. www.bappebti.go.i

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: berbakti@bappebti.go.id

Tanpa mengurangi rasa hormat dan upaya kerja keras pimpinan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terdahulu, dalam mengembangkan industri perdagangan berjangka, pasar lelang komoditi agro (PLKA) serta sistem resi gudang (SRG), Deddy Saleh sebagai Kepala Bappebti dalam waktu yang tidak terlalu lama membawa perubahan yang signifikan. Membuat perubahan besar di industri perdagangan berjangka, demi satu tujuan memperbaiki citra bisnis perdagangan berjangka yang tercoreng dari ulah praktik ilegal. Di sisi lain, pengembangan SRG dan PLKA terus berjalan menuju pasar yang ideal. Kinerja Bappebti selama tahun 2008, lalu, yang ditengah jalan dikomandoi Deddy Saleh, dapat dikatakan sukses dan diacungi jempol. Apa saja yang telah diraih Bappebti selama tahun 2008, itu, berikut ini intisarinya.



Bappebti

Lintas 2008

Saat pertama kali “menjejakkan” kaki di gedung Bappebti sekitar Juli 2008 lalu, Deddy Saleh, sang pemimpin baru mengaku bahwa dirinya tak akan menjanjikan sesuatu. Tetapi menurutnya, hal utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang sudah ada. Tampaknya, Deddy telah berhasil melakukan itu. Pada rentang periode masa jabatan awalnya, Juli - Desember 2008, tercatat dia telah melakukan banyak perubahan yang berarti. Setidaknya, Deddy memiliki keberanian tinggi untuk “menyepak” dan “menerjang” segala sesuatu yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan. Karenanya, tidak sedikit perusahaan pialang berjangka rontok berguguran. Bahkan perusahaan pialang berjangka berkelas seperti PT. Quantum Futures dan PT. Cayman Trust Futures didepak dari bursa. Sedangkan yang pertama kali merasakan getirnya didepak dari bursa adalah PT. Graha Finesa Berjangka.

“Saya tidak akan pilih kasih demi menegakkan peraturan. Karena memang saya hanya berpijak pada peraturan tersebut. Jika memang tidak dapat memenuhi peraturan, silahkan keluar. Dan kita memang harus tegas untuk memperbaiki citra bisnis perdagangan berjangka ini!” tegas Deddy Saleh, saat dipertanyakan keberaniannya mencabut

“nyawa” sejumlah perusahaan pialang.

Bukan hanya “menjungkirbalikan” perusahaan pialang nakal, Deddy Saleh, pun, membuat perusahaan-perusahaan bermasalah ini ketakutan dan kehilangan akal mengeruk pasar. Pada 17 Juli 2008, keluar Surat Edaran No. 244/Bappebti/7/2008 tentang Penertiban dalam Pelaksanaan Promosi Iklan. Inilah titik balik dari kegeraman Deddy Saleh akan tingkah memalukan para perusahaan pialang nakal tersebut. Antara lain dengan membuat iklan promosi menyesatkan demi menarik nasabah melalui iklan lowongan kerja.

Di sisi lain, Deddy Saleh, pun merapat kepihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada 7 Nopember 2008, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk pemberantasan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Nota kesepahaman itu demi mewujudkan kerja sama efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang kemungkinan dipraktikkan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Pada hari yang sama, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) didirikan dan dihadapan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. BAKTI merupakan suatu perhimpunan berbadan hukum

yang memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi, pemberian pendapat yang mengikat dan arbitrase. BAKTI sendiri diinisiasi oleh Bappebti, PT Bursa Berjangka Jakarta, PT Kliring Berjangka Indonesia, Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia.

Selain bertindak tegas, ternyata Deddy Saleh pun mampu lentur dalam urusan menggaet mitra kerja. Kerja sama dengan lintas departemen pun dijajaki demi percepatan pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) di daerah. Menurut Deddy, Bappebti selaku Badan Pengawas SRG sesuai amanat UU No. 9/2006, senantiasa diperbolehkan menempuh berbagai upaya dalam proses pengembangan instrument pembiayaan tersebut. Maka digandenglah tiga departemen teknis, yakni Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Kerja sama tersebut bukan hanya terfokus pada daerah-daerah yang memang telah menyelenggarakan SRG, tetapi juga kepada daerah-daerah baru yang dalam hal ini siap untuk melaksanakan. Deddy optimis

► Laporan KHUSUS ◀

kerjasama tersebut akan berhasil karena ketiga departemen itu memiliki hirarki dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah.

Tujuan kerja sama ini untuk memberikan pemahaman atas dasar hirarki kepada lembaga yang bernaung di bawahnya. Dalam hal ini merupakan pihak pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan SRG di wilayah masing-masing.

Menurut Deddy, dalam proses implementasi SRG selama ini, Bappebti yang berada di bawah Departemen Perdagangan memang mengalami kesulitan dalam praktik di lapangan akibat terbentur birokrasi lintas departemen. Sehingga diharapkan, melalui kerja sama lintas departemen tersebut pelaksanaan SRG dapat dilakukan dengan mudah.

Dan dalam upaya memperkenalkan SRG kepada kalangan petani, pengusaha serta birokrat daerah, hampir tiap minggu Deddy Saleh berada dikabin pesawat terbang. Itu dilakukannya agar instrument pembiayaan ini lekas dikenal masyarakat.

Sedangkan dalam urusan pengembangan SRG, Deddy Saleh juga tidak tanggung-tanggung 'mencuri ilmu' dari keberhasilan pihak luar negeri. Di Bulgaria, dia menemui banyak masukan dari pengelola SRG yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dan, pada 19 hingga 24 Desember 2008, bersama timnya terbang menuju Dubai menemui manajemen Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). Kunjungan ke DMCC itu, berharap dapat mengorek keberhasilan pihaknya yang sukses menerbitkan penggunaan Resi Gudang Elektronik secara *online* dengan dimensi global atau yang lebih dikenal sebagai Global Multi Commodities Receipt (GMR). Serta pelopor penggunaan Resi Gudang Elektronik untuk kawasan Timur Tengah.

Mengenai proses pengembangan SRG dan PLKA, Deddy juga layak

mendapatkan pujian. Misalnya, Deddy berupaya untuk mengembangkan komoditi SRG agar tidak hanya beras dan jagung. Sehingga komoditi lain yang sudah diatur sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-Dag/Per/6/2007 juga dapat dilaksanakan pada komoditi lain yang lebih komersial bahkan untuk tujuan ekspor seperti komoditi rumput laut, kopi atau lada. Sebab jika hanya fokus pada gabah dan jagung, maka dia menganggap penyerapan masyarakat akan manfaat instrument SRG akan lambat. Hal ini karena pengetahuan dari pelakunya yang belum pas, terutama para petani.

Loby pada kalangan legislative pun dilakukan Deddy Saleh dalam percepatan pengembangan SRG. Terutamanya terkait dengan kebijakan anggaran serta dukungan politis. Upaya itu pun berbuah hasil, sehingga terbit kebijakan pemerintah untuk bantuan subsidi bunga sebesar Rp 50 miliar bagi SRG.



Jika tahun 2008 sudah ada 7 daerah yang melaksanakan SRG, maka di tahun 2009, Pemda Jawa Tengah memang telah menargetkan pelaksanaan SRG di lima kabupaten. Pemda Kalimantan pun berencana melaksanakan SRG tersebut.

Sementara dalam proses pengembangan PLKA yang sudah ada di 19 daerah, Bappebti juga berupaya menggenjot pihak pemda untuk serius menggali dan mengembangkan manfaat instrument pasar ini. Apalagi dana yang sudah dialokasikan Bappebti sudah cukup besar. Karenanya Deddy

pada tahun 2009 menjadwalkan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan PLKA di daerah. Jika dalam evaluasi tersebut ditemukan indikasi "kurang gairah" maka, secara tegas Deddy menjamin akan mencabut dana bantuan yang selama ini dikucurkan tersebut.

Selain itu, Deddy juga ingin pasar lelang itu dikelola secara bisnis, artinya PLKA tersebut berkembang secara mandiri atau komersial sehingga tidak terlalu tergantung dari APBN atau APBD, saja. Selain menyusun aturan PLKA mandiri tersebut, Deddy juga berencana membentuk jaringan PLKA dan SRG.

Melihat selintas kinerja Bappebti 2008, itu, janji Deddy Saleh, seperti di atas, besar harapan industri perdagangan berjangka komoditi, instrument SRG dan PLKA bisa mencapai tujuan. Dan pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat dalam berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional ▲

Pencabutan Izin Pialang Berjangka

1. PT. Graha Finesa Berjangka
2. PT. Artha Berjangka Nusantara
3. PT. Cayman Trust Futures
4. PT. Quantum Futures
5. PT. Piranti Jaya Artha Futures

Peraturan Bappebti

1. No.63/BAPPEBTI/Per/9/2008, Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
2. No.62/BAPPEBTI/Per/3/2008, Tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka
3. No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang
4. No.09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, Tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang
5. No.08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, Tentang Pedoman Teknis Pengalihan Resi Gudang
6. No.07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008, Tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang

APBI Membangun Ditengah Masa Sulit



Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) tetap berusaha mempertahankan eksistensinya untuk mengembangkan bisnis investasi perdagangan berjangka di tanah air. Ditengah upaya membangun kepercayaan dengan meredam banyak kasus, APBI juga berjuang untuk “melawan” masa sulit yang diprediksi terjadi selama tahun 2009.

Menguak sekelumit dunia perdagangan berjangka di Indonesia, tentu tidak terlepas juga dari peranan APBI. Maraknya kasus penipuan terhadap nasabah yang dilakukan perusahaan pialang nakal, turut memperburuk citra bisnis investasi ini. APBI berupaya meredam dengan membantu penyelesaian kasus-kasus yang menimpa investor dan anggota APBI. Beragam rencana, kegiatan dan harapan APBI di 2009 juga terungkap secara mendalam melalui wawancara eksklusif Bulletin Berjangka dengan Ketua APBI, I Gede Raka Tantra, di Menara BCA Grand Indonesia, Jakarta. Berikut narasi dari petikan perbincangan kami.

Industri perdagangan berjangka tanah air secara umum saat ini dalam kondisi payah. Serangan tidak saja datang dari faktor internal tapi juga dari eksternal. Kondisi pasar global yang terhantam krisis keuangan juga berimbas pada industri perdagangan berjangka di tanah air. Terbukti rata-rata transaksi harian perusahaan pialang berjangka berkurang sekitar 50 persen. Dengan adanya kesulitan ini kami-pelaku pasar perdagangan berjangka, harus mencari bagaimana caranya menggairahkan pasar. Dan di sisi lain, bisa bertahan dengan kondisi yang sulit.

Faktor eksternal dan internal yang menghantam industri perdagangan berjangka tanah air saat ini, sama-sama tidak bisa dihindari. Dan sama beratnya bagi pelaku pasar.

Di bulan Januari 2009 ini, ada kebijakan otoritas perdagangan berjangka yang menentukan persyaratan baru modal disetor. Memang, tujuan dikeluarkannya peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 65/BAPPEBTI/Per/1/2009, itu, untuk mengamankan transaksi investor industri perdagangan berjangka.

Tetapi, bagi sebahagian besar pelaku pasar, persyaratan itu sangat memberatkan kondisi keuangan pe-

rusahaan pialang berjangka.

Perkiraan saya (pendapat pribadi), sekitar 60 persen lebih perusahaan pialang berjangka tidak mampu memenuhi persyaratan itu. Tetapi saya yakni mereka akan mencari jalan keluar untuk memenuhi peraturan itu. Mungkin salah satunya pilihan, yakni merger.

Sedangkan mengundang investor *local* untuk masuk perusahaan pialang berjangka, agaknya sulit. Sebab, berapa banyak masyarakat yang yakin dengan industri ini dan memiliki dana sebesar itu.

Jika mengundang investor asing, peluangnya sama sekali tertutup. Sebab, industri ini masuk dalam daf-

► Laporan UTAMA ◀

tar negative investasi bagi investor asing.

Jadi, dari pada izin operasi perusahaan pialang berjangka yang sudah dikantongi lenyap ditelan peraturan itu, pilihan *merger* lebih memungkinkan.

Kalau pun terjadi penyusutan jumlah pelaku perdagangan berjangka, itu konsekuensi logis dari keluarnya peraturan Bappebti. Dan APBI pada dasarnya mendukung kebijakan itu, agar industri ini beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, APBI pun terus berupaya melakukan pertemuan dengan anggota guna membahas jalan keluar yang terbaik.

Yang ditakutkan dengan munculnya peraturan persyaratan permodalan itu akan menyuburkan praktik perdagangan berjangka illegal. Memang saat ini pun ada banyak praktik perdagangan illegal yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak terorganisir. Oleh karena itu kami –APBI, sungguh tidak mengharapkan anggota APBI masuk dalam perangkap itu. Kalau pun mereka beroperasi di luar arena-illegal, pasti akan berhadapan dengan penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Bapepam-LK, Bappebti dan PPAATK.

Kebijakan lain yang membuat sulit pelaku perdagangan berjangka saat ini yakni soal pajak transaksi derivative. Saat ini ada kebijakan perpajakan yang mengenakan setiap transaksi derivative dikenakan pajak 2,5 persen. Jadi, misalnya, setiap ada transaksi Rp 100 juta, maka transaksi itu dikenakan pajak Rp 2,5 juta. Nilai itu sungguh mahal. Dan sangat memberatkan perusahaan pialang.

Sebelumnya, kebijakan pajak di bidang perdagangan berjangka diberlakukan setelah terjadi profit dari setiap transaksi.

Kebijakan baru perpajakan ini pun menurut kami APBI, akan membuat pelaku pasar kesulitan keuangan. Untuk itu, dalam waktu dekat ini APBI akan berupaya membahas persoalan pajak tersebut dengan se-

jumlah pihak, agar memberi solusi terbaik bagi industri perdagangan berjangka.

Penyelesaian Kasus

Dalam penyelesaian kasus beberapa perusahaan pialang berjangka yang dicabut izinnya oleh Bappebti, APBI mendapat peran sebagai mediator. Dalam kasus GFB, APBI berhasil menangani beberapa mantan investornya. Ada beberapa itu mengenai rekening-rekening terpisah yang dibekukan, BBJ dan Bappebti ke-

lai investasi tidak begitu besar. Yang memiliki dana investasi besar-besar sudah lebih dulu diselesaikan. Ya, artinya jangan sampai kita ini dipercaya oleh nasabah lalu kita lupakan. Jadi kepercayaan itu betul-betul kita laksanakan.

Dan APBI juga ikut mendirikan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan perusahaan pialang. Keluhan dari masyarakat saat ini memang belum ada yang masuk. Karena BAKTI



sulitan mengeluarkan dana nasabah itu. Karena yang mengeluarkan dana itu harus direktur dari perusahaan yang bersangkutan. Sekarang ini rekening sudah dibekukan, izin dicabut, jadi buntu. Jadi kita masuk kesana sebagai penengah. Karena kita berkepentingan jangan sampai kondisi ini memperburuk citra bisnis perdagangan berjangka. Bisnis ini bisa rusak namanya.

Kita menyelesaikan mereka (mantan nasabah) yang masih punya rekening ini. Ada yang baru masuk, lalu rekeningnya dicabut tapi uangnya masih utuh lalu kita keluarkan uangnya. Surat Bappebti ke bank itu untuk membuka rekening atas nama ini dan itu. Semua ini sudah. Saat ini masih sekitar sembilan nasabah lagi yang masih diselesaikan dengan ni-

pun masih mempersiapkan diri.

Perdagangan Berjangka

Menurut pendapat saya pribadi, untuk meningkatkan volume perdagangan berjangka komoditi yang terpenting adalah keberadaan speculator. Sepanjang kelompok ini tidak terbentuk, maka jangan diharapkan perdagangan berjangka komoditi atraktif.

Apa pun kontrak komoditinya, kalau kelompok speculator tidak ada, perdagangan akan tetap sepi. Jadi, yang didorong seharusnya kelompok speculator.

Mengacu pada undang-undang perdagangan berjangka, speculator disebut market maker. Di beberapa Negara, seperti Amerika speculator terdiri dari tiga kelompok. Dari

tiga kelompok inilah yang membuat harga perdagangan berjangka bergerak.

Coba kita lihat di India, *Multi Commodity Exchange* (MCE), kelompok *speculator* yang berperan jumlahnya sangat tinggi sekali. Sampai mereka memasang alat sampai ke desa-desa bagaimana untuk melakukan transaksi itu. Jadi petani bisa melakukan *hedging*. Sehingga dalam 3 tahun mereka sudah *break event*. Aktifnya para *speculator* itu di MCE mendapat membuat pelaku pasar di Amerika salut. Itu yang seharusnya kita pelajari, bagaimana menggerakkan harga.

Kita kasih contoh misalnya emas. Kita lihat pedagang emas di Pasar Senen yang sering melakukan *spekulasi*. Kenapa bukan itu yang ditarik untuk meramaikan pasar? Bursa yang mengajak mereka, dan dilatih untuk berdagang di bursa. Mungkin dalam tahap awal, *fee* transaksi dikenakan sekecil mungkin sehingga mereka tertarik. Di luar negeri juga kecil, *kok*. Dan mereka nantinya juga tidak akan kepanasan seperti saat jualan di Senen. Kan di bursa ada AC-nya? Nah itu, mungkin yang kecil-kecil itu kita angkat. Untuk yang lain-lain, dengan Bergeraknya harga maka semua akan ikut.

Bila pun diberikan insentif, kalau harganya tidak bergerak bagaimana orang melakukan transaksi. Kita lihat harga-harga yang terjadi saat ini di bursa, tidak bergerak. Sehingga transaksinya minim.

Kalau perbedaannya dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), di sana tidak ada *trader*, yang ada analis. Jadi beda. Transaksinya juga karena disana fisik, disini *futures*. Pemegang saham jangan hanya berkiblat di BEI saja. Kita harus lihat itu bagaimana sih. Kalau kita dagang kopi, kita harus tahu bagaimana kopi itu. Kapan naiknya, kapan turunnya. Kapan dipanennya. Ini yang harus dipelajari. Mengenai resiko melekat pada barang itu. Kalau harga barang itu turun berarti orang itu rugi, kalau

harga barang itu naik berarti orang tersebut untung.

Komoditi itu memiliki ciri-ciri khusus. Kalau kita menganalisa harga, seperti beras, kita harus menganalisa yang mana. *Supply* apa *demand*-nya. Kalau *supply*-nya berkurang, pasti harganya akan naik. Begitu pula sebaliknya.

Seharusnya Indonesia memiliki peluang besar dalam perdagangan komoditi. Karena kita memiliki sejumlah komoditi yang diperdagangkan di pasar internasional. Sekarang sudah ada pasar *futures*-nya tetapi tidak jalan. Ini yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa terjadi? Sedangkan di Negara lain bisa. Seharusnya kita bisa belajar dari pengalaman dari Negara lain.

Menurut hemat saya, Indonesia bisa menjadi Negara acuan harga sejumlah komoditi primer. Seperti kakao, kopi, *crude palm oil* (CPO) dan lainnya.

Komoditi primer tadi sudah pernah di perdagangkan BBJ, tetapi akhirnya semua mental. Karena tidak ada investor yang tertarik masuk.

Saya mau ambil contoh di Brazil. Di Negara ini, kontrak berjangka kopi diperdagangkan 1 lot dalam hitungan kwintal, sekitar 800 kg. Mereka berhasil, transaksi harian kopi Brazil mencapai jutaan lot.

Bandingkan dengan di BBJ, kontrak berjangka kopi yang pernah diperdagangkan 1 lot-nya 5 ton. Inilah yang membuat salah satunya investor kurang menarik.

Kita seharusnya bisa melihat contoh itu, dan duduk sama-sama berpikir untuk memajukan bursa. Sehingga investor dari luar negeri juga bisa membeli produk kita. Kalau investor asing transaksi terhadap komoditi kita, pasti pelaku pasar yang tadinya hanya bertransaksi kontrak keuangan berpindah kekontrak komoditi.

Nah, sekarang masalahnya yang satu itu tadi, tidak adanya pedagang. Itu saja! ▲

Program APBI 2009

1. Menggairahkan industri perdagangan berjangka dari kesulitan likuiditas.
2. Membangun citra bisnis perdagangan berjangka.
3. Mendorong lahirnya wakil-wakil pialang baru melalui ujian dan pelatihan.
4. Mendukung upaya merger bagi perusahaan-perusahaan pialang kecil.
5. Menyarankan penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa.
6. Mendukung upaya pembentukan harga terhadap komoditi lokal.

I Gde Raka Tantra

"Kondisi pasar global yang terhantam krisis keuangan juga berimbas pada industri perdagangan berjangka di tanah air. Terbukti rata-rata transaksi harian perusahaan pialang berjangka berkurang sekitar 50 persen."

"Kalau pun terjadi penyusutan jumlah pelaku perdagangan berjangka, itu konsekuensi logis dari keluarnya peraturan Bappebti. Dan APBI pada dasarnya mendukung kebijakan itu, agar industri ini beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

"Yang ditakutkan dengan munculnya peraturan persyaratan permodalan itu akan menyuburkan praktik perdagangan berjangka illegal."

"..., untuk meningkatkan volume perdagangan berjangka komoditi yang terpenting adalah keberadaan *speculator*. Sepanjang kelompok ini tidak terbentuk, maka jangan harapkan perdagangan berjangka komoditi aktraktif."

"Kebijakan lain yang membuat sulit pelaku perdagangan berjangka saat ini yakni soal pajak transaksi *derivative*."

UU No.32/1997

Tidak Kenal Tenaga Marketing

Maraknya kasus penipuan terhadap nasabah yang dilakukan perusahaan pialang nakal, menodai dunia bisnis perdagangan berjangka. Demi meminimalisir keadaan, pihak otoritas pun mengeluarkan ketentuan. Antara lain dengan menghapus posisi jabatan tenaga marketing di perusahaan pialang berjangka. Meski demikian, ada upaya untuk tetap merangkul posisi jabatan ini dengan mengajukan pihak penasihat berjangka.

Kepala Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Deddy Saleh mengungkapkan, jika pihaknya tengah mempersiapkan Surat Keputusan (SK) mengenai profesi penasihat berjangka sebagai pelengkap dari wakil pialang berjangka (WPB) dalam memberikan pemahaman kepada calon nasabah. Menurutnya, rencana pembukaan peluang terbitnya SK bagi profesi penasihat berjangka, karena profesi ini diatur dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi No. 32/1997.

Profesi penasihat berjangka pada dasarnya bertugas memberikan nasihat kepada nasabah untuk melakukan transaksi berjangka. Dan wacana tersebut menyeruak ke permukaan dengan mempertimbangkan banyaknya tenaga marketing yang saat ini terabaikan begitu saja ketika perusahaan pialang

Jegal praktik illegal perdagangan berjangka, tenaga marketing diharamkan!

ditutup atau dicabut oleh pihak otoritas. Deddy menganggap penting untuk mengambil peran tenaga marketing dan memperkuat WPB dalam pemahaman bagi pihak investor.

Data Bappebti 2006 menyebutkan, dari 76 Pialang Berjangka, 40 Pedagang Berjangka dan sebanyak 19 Penyelenggara SPA, jumlah Wakil Pialang Berjangka baru sekitar 807 orang saja.

Memang dalam SK No. 64/Bappebti/Per/1/2009 yang merupakan revisi atas SK. No. 63/Bappebti/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, dijelaskan jika hanya wakil pialang yang diperbolehkan memberikan pemahaman kepada nasabah. Dan Pegawai pialang berjangka atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan pialang dilarang menerima surat kuasa dalam bentuk apa pun dari calon nasabah atau nasabah, kecuali kuasa tertentu yang diatur dalam peraturan itu.

Setelah menerbitkan larangan bagi pihak tenaga pemasaran untuk berhubungan langsung dengan nasabah, masalah pemahaman mengenai risiko dan profit merupakan tugas WPB. Sementara pihak penasihat berjangka juga mengambil peran disana. Dan penasihat berjangka dapat diajukan perorangan atau dengan mendirikan perusahaan khusus penasihat berjangka dengan izin Bappebti. Melalui pemberian nasihat kepada nasabah, penasihat berjangka akan memperoleh *fee*. Pada perkembangannya nanti, profesi ini seperti pihak konsultan pajak.

Bermasalah

Pada pertengahan tahun 2006 lalu, PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)

pernah mengeluarkan surat edaran untuk mengatur tindak-tanduk tenaga pemasaran produk bursa berjangka yang berdampak merugikan nasabah. Karena banyak terjadi keluhan dari nasabah mengenai produk berjangka berkaitan dengan tenaga pemasaran yang tidak hati-hati. Saat itu Dirut BBJ Hasan Zein Mahmud mengungkap data, jika sejak awal tahun 2006 hingga Juni di tahun yang sama ada sekitar 100 pengaduan dari nasabah yang umumnya tentang tenaga marketing yang tidak *prudent*.

Keluhan nasabah cukup beragam mulai dari bujuk rayu terhadap nasabah yang belum layak masuk ke industri bursa berjangka, membuat pembukuan palsu bekerjasama dengan tenaga pembukuan, mengubah konfirmasi transaksi hingga melarikan dana nasabah. Dan menurut Hasan, saat itu masih banyak tenaga pemasaran yang belum paham mengenai seluk beluk bursa berjangka dan etika pemasaran. Sebagai ilustrasi, dari sekitar 4.458 tenaga pemasaran yang didaftarkan oleh perusahaan pialang hanya 155 orang yang memiliki izin WPB alias legal.

BBJ pun selanjutnya mewajibkan perusahaan pialang untuk mendidik dan mengarahkan tenaga pemasarannya menjadi WPB. Selain itu perusahaan pialang juga diwajibkan membuat perjanjian khusus dengan tenaga pemasaran. Perjanjian itu sekurangnya berisi tenaga pemasaran wajib mengetahui nasabahnya, tidak boleh menjanjikan *fix income*, tidak menerima dana nasabah, tidak boleh mewakili pialang menyampaikan konfirmasi transaksi dan tenaga pemasaran juga



tidak boleh bekerja sama dengan pialang lain pada saat yang bersamaan.

Kepala Bappebti Deddy Saleh, pada awal masa kepemimpinannya ternyata cukup gerah juga dengan sepak terjang para perusahaan nakal ini. Maka dengan tegas Deddy saat itu menyatakan mempunyai sejumlah rencana perbaikan sistem yang ada, terutama untuk mencegah korban baru dari penipuan nasabah. Pertama, Deddy berencana mengeluarkan penerbitan ketentuan yang tidak memperbolehkan pialang menggunakan tenaga marketing karena dalam peraturan yang boleh berhubungan dengan nasabah itu kan WPB. Hal ini untuk mencegah pialang melepas tanggung jawab kepada tenaga marketing yang beroperasi.

"Selama ini, modus operasinya seperti itu, dia merekrut tenaga marketing, lalu tenaga marketing itu beroperasi. Namun, jika ada masalah mereka (marketing) dilepas seolah

tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Itu yang akan kami cegah supaya perusahaan punya tanggung jawab terhadap wakil pialang yang jelas kaitannya dengan perusahaan. Wakil pialang selama ini harus diusulkan oleh pialang," ujar Deddy.

Dijelaskannya jika memang sebelumnya belum ada ketentuannya atau belum ditegaskan, meskipun peraturan dan turunannya ada yaitu wakil pialang jelas berhubungan. Memang ada dalam permohonan pengajuan pendirian perusahaan mencantumkan WPB minimal 3 orang. Tetapi selama ini [perusahaan pialang] beralasan tidak punya tenaga untuk menghubungi nasabah atau mencari nasabah sehingga menggunakan marketing. Kami perbanyak tenaga pemasaran itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan Deddy menegaskan jika ketentuan mengenai penerbitan tenaga marketing ini akan dikeluarkan sekitar sebulan lagi.

Selain itu, Deddy juga berjanji akan melakukan penertiban praktik pemasangan iklan, khususnya dalam merekrut nasabah melalui iklan lowongan kerja. "Tinggal tindakannya yaitu peringatan sesuai prosedur, peringatan keras bertahap 1-3, dan kalau masih dilakukan, kami cabut!" kata Deddy waktu itu.

Diatur Undang-undang

Sebenarnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada BAB I Ketentuan Umum ayat 12 menyebutkan: Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Sementara pada ayat 16 dijelaskan; Pedagang Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka, adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi

Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.

Dan pada ayat 17 juga dijelaskan; Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bagian keempat (Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka). Pada Pasal 57, menyebutkan; Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bappebti.

Lalu pada Pasal 58 diterangkan; Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantaraan perdagangan Kontrak Berjangka.

Izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka Komoditi.

Izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka.

Dan Pasal 59 dijelaskan; Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut: sertifikat pendidikan formal; tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan rekomendasi dari Pialang Berjangka atau Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti. ▲



Bagi konsumen, mungkin harga gula saat ini sudah tidak semanis rasanya. Diperkirakan akan segera terjadi lonjakan harga menjelang memasuki masa di luar musim giling. Sementara itu, khusus gula kasar dan gula rafinasi bagi industri, tetap ada pembatasan untuk izin impor.

■ ■ ■ Harga Gula Diprediksi Tinggi

Menurut Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Mustafa Abubakar, harga gula di tingkat konsumen masih Rp 6.000/ kg. Namun dia memprediksi, akan terjadi kenaikan antara Rp 500 hingga Rp 1.000 untuk setiap kilogram menjadi antara Rp 6.500 hingga Rp 7.000/ kg. Perkiraan kenaikan harga itu akan dirasakan mulai Februari mendatang. Sebab periode Februari sampai April merupakan masa di luar musim giling.

Bagi Bulog, memiliki komitmen untuk dapat membantu menciptakan kestabilan harga gula di pasaran lokal. Apalagi untuk pola pendistribusian gula, sejak 25 November 2008, lalu, sudah ada kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Tercatat, hingga akhir tahun 2008 Bulog sudah memasarkan sebanyak 104 ribu ton gula dari target 282 ribu ton gula PTPN. Sementara sebagian lagi rencananya merupakan pencapaian target akhir Februari 2009, nanti. Dalam hal ini, Bulog akan menjadi pihak distributor di jalur satu, sebelum ke pedagang besar dan pengecer. Pemangkasan mata rantai jalur distribusi

ini juga bertujuan memberikan harga yang jauh lebih baik bagi pihak produsen.

Selanjutnya, untuk memasarkan gula dari PTPN dan juga PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) kerja sama juga dijalan Bulog dengan pihak Asosiasi Pengusaha Gula dan Tepung Terigu Indonesia (Apegti) dan Induk Koperasi Pedagang Pasar dan Pemasaran (Inkoppas). Dalam hal ini, Bulog merupakan agen pemasaran, Apegti sebagai distributor pada Lini I dan II sementara distributor untuk Lini III dan pengecer diserahkan kepada Inkoppas.

Sementara itu Departemen Perdagangan juga mulai melakukan pembatasan terhadap pemberian izin impor gula kasar dan gula rafinasi. Lebih jauh dijelaskan Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Albert Yusuf Tobogu, penerbitan izin impor gula kasar diperuntukkan hanya 6 bulan ke depan dan gula rafinasi 4 bulan. Jika batas waktu habis, maka selanjutnya izin impor akan kembali di evaluasi.

Demi membaiknya produksi dalam negeri, memang kuota impor gula yang

diizinkan masih di bawah alokasi yang disetujui di Kantor Menko Perekonomian yang mencapai 1,6 juta ton. Apalagi rekomendasi impor sebenarnya hanya bagi industri yang memerlukan Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan spesifikasi khusus dan memang belum mampu dipenuhi dari lokal. Izin impor pun dikurangi agar kebutuhan gula dari industri makanan dan minuman ini dapat mempergunakan produk rafinasi dari negara sendiri.

Khusus izin impor gula ini memang diberikan kepada 7 industri lokal, yakni PT Sugar Labinta, PT Pertama Dunia Sukses Utama, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Jawamanis, PT Angels Product, PT Dharmapala Usaha Sukses dan PT Makassar Tene, dengan total kuota sebanyak 807.365 ton. Sementara kepada lima perusahaan lainnya untuk impor gula rafinasi dengan total 11.714 ton Tiga diantara perusahaan ini diantaranya, PT Seasonal Supplies Indonesia, PT Riau Sakti United Plantation, PT Great Giant Pineapple, Nestle dan Sari Husada.

Harga Kakao Melambung, Petani Bersenandung

Meski ekspor kakao Sulawesi Tengah 2008 lalu melorot, tetapi rupanya tetap ada kabar menggembirakan dari kaum petani. Setidaknya, harga kakao tercatat terus mengalami lonjakan. Bahkan harga komoditas ini sekarang sudah berada dikisaran Rp 27.000/kg. Suatu harga yang lumayan fantastis, apalagi memang belakangan ini harga kakao cenderung melambung diatas Rp 20.000/kg.

Dengan kenaikan harga kakao itu, dapat dipastikan pendapatan di tingkat petani meningkat sekitar 20 persen dari tahun lalu, atau rata-rata antara Rp 23.000 hingga Rp 24.000/kg.

Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Sulteng, Herman Agan, bahkan terang-terangan mengakui jika harga kakao saat ini sudah berhasil mengangkat pendapatan petani di daerahnya. Apalagi pasokan kakao di pasar global memang kurang, sehingga kondisi harga kakao memang tidak pernah jelek malah justru meningkat.

Data Askindo menyebutkan, luas lahan yang ditanam bijikakao di Sulteng mencapai 190 ribu hektare. Demi meningkatkan produksi kakao, Askindo juga berencana menjalankan program kerja pembibitan satu juta bibit kakao mulai Maret tahun ini. ▲

Harga Komoditas Tambang Tak Lagi Bimbang

Penantian akan terjadi *rebound* bagi semua komoditas tambang memang sedang dilakukan. Nikel dan batubara telah memperlihatkan usahanya untuk kembali ke level perbaikan. Setelah sebelumnya harga kedua komoditas ini dibuat jungkir balik oleh spekulasi. Harga timah pun diharapkan juga berhasil kembali ke harga wajar, seperti layaknya baja yang diprediksi akan paling mampu bangkit dari keterpurukan setelah hampir 5 bulan harganya terus terpojok.

Menurut Dirjen Minerba dan Panas Bumi ESDM, Bambang Setiawan, harga komoditas tambang pada tahun lalu harganya melorot sekitar 50 persen, seperti batu bara, nikel dan timah saat ini malah sudah mendekati *rebound*. Bahkan untuk posisi harga yang sekarang, produsen dipastikan masih mampu meraup keuntungan. Bambang mencontohkan harga timah saat ini yang berada di level 10 ribu dolar AS, yang menurutnya tidak dapat dikatakan sangat rendah sebab masih mendatangkan margin keuntungan bagi pihak produsen.

Hal yang sama juga terjadi pada batubara yang pada akhir tahun lalu memang *nyaris* "menyenggol" harga normal. Harga batu bara di pelabuhan New South Wales pada 2 Januari turun dari 1,37 dolar AS per ton menjadi 79,19 dolar AS per ton. Meski memang harga ini belum sebanding jika dibandingkan dengan kemilau batu bara pada 4 Juli tahun lalu yang mampu mencapai 194,79 dolar AS per ton. Walaupun harga komoditas ini diprediksi akan mengalami tren penurunan, tetapi produsen tetap saja masih bersahabat dengan keuntungan.

Berpijak dari penilaian itu, Bambang berharap pihak produsen komoditas tambang tidak mengurangi produksinya kecuali kondisi perusahaan memang sudah diujung tanduk. Meski demikian, pendapat ini justru berseberangan dengan Head of Research PT BNI Securities, Norico Gaman. Gaman justru yakin,

Kabar baik juga ditiupkan dari lokasi pertambangan. Meski sebelumnya cenderung memperlihatkan kelemahannya, tetapi komoditas ini akhirnya diprediksi akan kuat berjuang demi memperbaiki harga. Sekuat apa kemampuan itu, yang jelas harga komoditas tambang memang nampak sudah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk kembali "rujuk" ke level normalnya.

pemangkasan produksi merupakan opsi yang dimungkinkan terjadi karena harga jual komoditas tambang tidak sebanding dengan biaya operasional perusahaan. Dia mencontohkan kondisi timah, demi kembalinya harga timah ke level 18 ribu dolar AS/ton hal yang terbaik yang harus dilakukan justru pemangkasan produksi nasional yang saat ini jumlahnya tak lebih dari 100 ribu ton/tahun itu.

Sementara itu, Michael Rawlinson dari Capital Ltd justru memprediksi akan terjadi kenaikan harga pada baja. Menurut pria yang menjabat sebagai Kepala Pertambangan, Sumber Daya dan Energi di perusahaan pialang besar di London ini, setelah terjadi kenaikan harga *spot* untuk bijih besi, maka lonjakan harga pada baja akan terjadi tahun ini. Memang tercatat, sejak 31 Oktober tahun lalu kontrak bijih besi merangkak naik sekitar 24 persen meski hal tersebut tidak dapat dikatakan terlalu menggembirakan. Meski demikian, memang pasar global untuk baja memang menuai ketertarikan. Setidaknya China yang memang merupakan negara "pelahap" baja terbesar di dunia mengaku akan mengeluarkan biaya sekitar 585 miliar dolar AS untuk membeli baja bagi sektor jalan, kereta api, bandar udara dan perumahan.

Bicara baja, tahun lalu memang seperti mengulik kisah suram. Setelah pada permulaan sempat memperlihatkan sinar

cerah, akhirnya harga baja di pasar global menuai kecewa. Sejumlah pabrik baja mulai menghentikan kegiatan produksi, seperti yang dilakukan PT Krakatau Steel dan banyak perusahaan besi beton. Pebisnis baja rupanya "tertipu" angin surga yang ditiupkan di bulan Agustus, saat harga baja melambung hingga 1.220 dolar/ton.

Akibatnya, terjadi spekulasi perusahaan baja sehingga memicu terjadinya volume impor yang "jor-joran". Tercatat, nilai dan volume impor bahan baku dan *semifinished product* (produk setengah jadi) sebesar 124,3 persen menjadi 10,15 miliar dolar AS atau setara dengan 10 juta ton! Alih-alih meraup untung, ternyata harga baja justru kian melorot sejak September. Bahkan harganya di Desember tak berkutik di level 450 dolar AS per ton. Karena enggan merugi, akhirnya penumpukan stok tak terelakkan lagi.

Padahal menurut Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin, Ansari Bukhari, industri baja harus berani memilih menjual rugi agar stok terkurangi. Selanjutnya, agenda penyelamatan industri baja dilakukan dengan mengintensifkan manajemen risiko dengan mengurangi aksi spekulasi menurunkan harga untuk penyerapan produk baja lokal, membangun pabrik baja kasar untuk memangkas impor serta memperkuat sinergi dan kebersamaan industri hulu dan hilir. ▲

●●●● Batas Minimum Permodalan Peluang Merger Pialang **Kacuk**

Di awal tahun 2009, ini, Bappebti mengeluarkan aturan yang menghentak pelaku pasar perdagangan berjangka tanah air. Melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 65/Bappebti/Per/1/2009, tertuang persyaratan baru bagi perusahaan pialang berjangka yang memberi batas minimum permodalan penyelenggara system perdagangan alternative (SPA) sebesar Rp 15 miliar. Meski nilainya jauh lebih rendah dibandingkan persyaratan yang ditetapkan di luar negeri, namun dapat dipastikan cukup membuat *ketar-ketir* perusahaan pialang bermodal minim.

Kacuk- bingung, tidak perlu! Sebab masih ada peluang merger, kok!

SK Kepala Bappebti No. 65/Bappebti/Per/1/2009, yang terbit pada 9 Januari 2009, itu, menyatakan, pemenuhan batas minimum permodalan perusahaan pialang berlaku efektif 1 Juli 2009. Dan selanjutnya, jumlah modal yang disetor tersebut akan ditingkatkan kembali untuk setiap 6 bulan. Atau jika diperhitungkan, pada 1 Januari 2010, jumlahnya merambat menjadi Rp 20 miliar, lalu meningkat lagi menjadi Rp 25 miliar pada 1 Juli 2010 dan pada Januari 2011 jumlahnya sudah mencapai Rp 30 miliar.

Menurut Kepala Bappebti, Deddy Saleh, persyaratan mutlak tersebut tidak akan menimbulkan kecemasan akan bergugurannya perusahaan pialang yang sebelumnya beroperasi. Sebab tetap ada alternatif bagi para perusahaan pialang yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, yakni melalui merger.

Merger antar perusahaan pialang bermodal minim tersebut tentu saja dihalalkan, ketimbang mereka nekad beroperasi tetapi melanggar persyaratan. Deddy pun tidak khawatir jika pun

nantinya jumlah perusahaan pialang ini akhirnya malah semakin berkurang.

"Semakin sedikit, justru semakin mudah untuk mengawasinya. Kita harus mengubah *image* negatif dari bisnis perdagangan berjangka ini. Biarkan yang tersisa hanya pialang yang baik. Biar pun jumlahnya cuma lima atau sepuluh saja" kata Deddy.

Setelah pelantikan dirinya sebagai kepala Bappebti yang baru, menggantikan Titi Hendrawati, Deddy Saleh memang pernah mengungkapkan keprihatinannya kepada **Bulletin Berjangka** terhadap kondisi bisnis perdagangan berjangka tanah air. Sebagai orang yang sempat berada di "luar" bisnis ini, Deddy mengakui secara pribadi dia pun menilai jika *image* negatif tersebut memang sudah keburu melekat. Sehingga bisnis perdagangan berjangka menjadi kurang berkembang baik di Indonesia.

Secara terang-terangan kala itu dia menuding, oknum-oknum pialang nakal yang bergerak didalamnya yang menjadi salah satu biang keladi atas segala jenis kasus penipuan terhadap para nasabah yang kian marak ini. Sehingga perlu segera dilakukan upaya untuk meminimalisir kondisi tersebut. Salah satunya dengan "memangkas" pialang nakal dengan memperketat peraturan seperti adanya pembatasan persyaratan permodalan itu. Sehingga dapat menciptakan rasa aman serta perlindungan khususnya bagi para nasabah, serta semua pihak yang berkembang di dalam bisnis perdagangan berjangka.

"Salah satu pertimbangan yang sangat serius, sistem ini harus diperbaiki. Melalui peraturan yang diperketat ini, pialang yang ada niat yang tidak baik, dia akan keluar dari bisnis ini dengan sendirinya. Artinya memang akan ada seleksi melalui peraturan ini, sehingga



yang ada nanti hanya yang terbaik. Bahkan bisa terbuka peluang untuk merger!" ungkap Deddy Saleh waktu itu.

Bahkan Deddy mengaku, jika dia sendiri pernah kesulitan memperoleh jawaban saat bertanya kepada para pialang untuk menunjukkan mana saja pialang-pialang yang baik. Sementara pialang yang selama ini katanya masuk dalam kategori baik pun tidak mampu menjelaskan mengenai hal itu.

"Wah, kata saya, mereka saja tidak berani menyebutkan. Jangan-jangan yang ada ini *nggak* baik semua! Tapi mereka langsung menjawab, *nggak* Pak. Tentu ada pialang yang baik," seloroh Deddy sambil tertawa.

Hanya, Deddy menegaskan, jika dirinya tidak akan sembarangan dalam menegakkan peraturan tersebut. "Saya tidak akan pilih kasih, yang melanggar pasti diberikan sanksi. Saya cuma berpedoman pada aturan!"

Ternyata, SK Kepala Bappebti tersebut juga mendapat dukungan penuh dari pihak Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Bahkan Dirut PT BBJ, Hasan Zein Mahmud menyarankan agar pialang skala kecil "rame-rame" merger. Seperti layaknya Deddy Saleh, Hasan pun menilai jumlah perusahaan pialang bukan suatu hal mutlak yang harus dipertahankan. Sebab baginya, yang terpenting bukan kuantitas melainkan kualitas dari perusahaan pialang tersebut. Dan batas minimum permodalan tersebut dianggapnya juga wajar, mengingat batas minimum permodalan di luar negeri justru jauh lebih besar. ▲



Direktur Kepatuhan Mengurangi Pelanggaran dan Memperkuat Peraturan

Selamat datang para pejabat baru direktur kepatuhan! Mungkin inilah ucapan yang akan disebutkan seluruh karyawan perusahaan pialang di Indonesia. Kepada pihak-pihak yang terpilih untuk mengisi jabatan *prestisius* tersebut yang menurut Kepala Bappebti, Deddy Saleh, paling lambat harus dilaksanakan bulan Februari 2009.

Deddy Saleh menuturkan, jabatan Direktur Kepatuhan memang bukan jenis jabatan "biasa". Sebab seseorang yang berhasil mendapatkan posisi penting ini, harus terlebih dahulu melewati proses panjang. Mulai dari pengajuan persetujuan pencalonannya dari direksi perusahaan pialang kepada Bappebti, untuk kemudian

mampu "menaklukan" serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Sebagai langkah independensi, Direktur Kepatuhan ini juga hanya boleh diangkat dan diberhentikan oleh Bappebti.

Hal tersebut tentu, kata Deddy, jelas bukan tanpa alasan. Mengingat seorang direktur kepatuhan harus menjalankan misi penting dalam tugasnya. Yakni, mengurangi pelanggaran dan memperkuat perbaikan peraturan terkait dengan penyelesaian

perselisihan di industri berjangka yang kian marak akhir-akhir ini.

Deddy berharap, kebijakan yang termasuk dalam program revitalisasi lembaga demi peningkatan penegakan hukum tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Apalagi selama ini, dalam kenyataannya sebagian perusahaan pialang nampak masih enggan menangani klaim dari nasabah. Sehingga pihaknya menganggap perlu untuk meniru industri perbankan yang menerapkan pemenuhan syarat kepatuhan dari Bank Indonesia. ▲



Perdagangan Fisik Beras Belum Diatur Keppres

Perdagangan fisik beras belum dapat dilakukan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), karena komoditi itu belum termasuk komoditi yang telah mendapat 'restu' dari presiden. Komoditi yang dapat diperdagangkan BBJ hanyalah komoditi yang telah diatur sesuai Keputusan Presiden (Keppres). Hingga saat ini telah ada tiga Keppres yang dikeluarkan terkait komoditi yang dapat diperdagangkan BBJ. Yakni, Keppres No. 12/1999, tentang komoditas kopi dan minyak kelapa sawit, Keppres No. 73/2000 tentang tambahan komoditas kayu lapis (plywood), karet, kakao dan lada. Serta, Keppres No. 119/2001 tentang komoitas gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkih, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batu bara, timah, pulp, kertas, benang, semen dan pupuk.

Demikian antara lain dikatakan Kepala Bappebti, Deddy Saleh, menyusul adanya rencana BBJ memperdagangkan secara fisik komoditi beras. "Perdagangan fisik beras belum dapat dilakukan BBJ karena

memang belum diatur dalam Keppres," katanya.

Oleh karena itu Bappebti belum bisa memberi izin kepada BBJ memperdagangkan secara fisik komoditi beras, tambahnya.

Rencana perdagangan fisik komoditi beras di BBJ menyusul adanya keinginan pimpinan Divisi Pembiayaan UKM dan Koperasi, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Don Rico Menayang, untuk menyediakan dana sekitar Rp 25 miliar sebagai bentuk insentif untuk merealisasikan perdagangan fisik beras.

Berdasarkan proposal yang diajukan pimpinan Dekopin itu, rencananya dana tersebut selanjutnya akan dikelola pihak manajer investasi, yang ditunjuk untuk memperoleh tambahan dana membiayai transaksi pembelian komoditas beras petani. Sementara itu komoditi beras yang akan diperdagangkan berasal dari petani binaan Dekopin. Dan, dengan perdagangan fisik komoditi beras yang terorganisir tersebut, diharapkan dapat



membentuk referensi harga sebagai acuan perdagangan berjangka komoditi beras.

Sementara itu, Dirut BBJ Hasan Zein Mahmud, mengatakan, aspek pembiayaan bukan usaha inti BBJ.

"Untuk merealisasikan wacana tersebut, yang pasti BBJ perlu mendapatkan persetujuan pemegang saham. Serta, mendapat izin dari Bappebti," jelas Hasan.

Dan kami yakni, hal itu tidak akan mendapat izin dari Bappebti, sebab komoditi beras bukan komoditi yang dapat diperdagangkan BBJ, tambahnya. ▲

On Job Training di TOCOM

Tim Bappebti yang terdiri Sekretaris Bappebti, Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kepala Bagian Pelanggaran Administrasi dan Kepala Sub Bagian Pengawasan Transaksi, mengikuti pelatihan di Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) dan Tokyo Grain Exchange (TGE), 16 – 22 Desember 2008. Dalam pelatihan tersebut, pihak TOCOM maupun TGE, menyampaikan informasi penting dalam rangka pengembangan kegiatan perdagangan berjangka terutama pengembangan kontrak-kontrak primer.



**Kepala Bappebti
Tilik Valbury Asia Futures**

Kepala Bappebti Deddy Saleh didampingi pejabat Eselon II, mengunjungi kantor pusat PT. Valbury Asia Futures, 10 Desember 2008. Kunjungan itu guna melihat secara langsung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pialang, terkait dengan proses penerimaan dan penyampaian amanat dari nasabah, pengoperasian IT, perkembangan harga komoditi, forex index dari berbagai bursa



Kepala Bappebti dan Mr. Gan Seow Ann



Sicom Kunjungi Bappebti

**Kunjungan Singapore
Commodity Exchange Dan
Singapore Exchange
Pada Tanggal 7 Januari 2009**

Kepala Bappebti didampingi Pejabat Eselon II Bappebti menerima kunjungan Mr. Gan Seow Ann - Senior Executive Vice Presedent Singapore Exchange dan Mr.Jeremy Ang - Chief Executive Officer Singapore Commodity Exchange (SICOM). Kunjungan itu bertujuan mejajagi kemungkinan kerjasama antara bursa Singapore dengan bursa berjangka di Indonesia.

Kita telah lama mengenal pohon pinang. Dalam literatur kebudayaan Indonesia, diantaranya juga menyiratkan tentang keberadaan pohon ini. Begitu melekatnya pohon pinang dalam kehidupan kita, bahkan dalam pepatah lama untuk menyebutkan pola kesamaan ciri, kita pun menggunakan pinang untuk istilah “Bagai Pinang Dibelah Dua”. Di dunia kesehatan, kita pula mengenal pinang sebagai obat beragam penyakit, mulai dari kanker, diare, cacingan hingga masalah kewanitaan. Dan di wilayah perdagangan, pinang jelas komoditi yang mampu menghasilkan gemerincing uang.

Tersebutlah kisah, tentang sebatang pohon pinang yang menaungi Setra Gandamayit, di mana Sang Batari Durga bersemayam. Relief Candi Suku yang diperkirakan dibuat pada abad ke-15 itu, sebagai bukti bahwa pohon pinang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat di nusantara bahkan sejak berabad-abad lampau. Bukan hanya relief Candi Suku yang mengukir kedalaman kisah tentang perjalanan kehidupan pohon pinang. Candi Borobudur juga menggambarkan keberadaan pohon ini di masa itu.

Pinang (*areca catechu*) sebenarnya merupakan sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Di Indonesia, pinang dikenal dengan beragam nama. Seperti *pineung* (Aceh), *pining* (Batak Toba), serta pinang, batang mayang atau boni untuk sebutan di wilayah Sumatera lainnya. Lalu juga ada sebutan *penang* atau *jambe*, *penang*, *wohan* untuk beberapa daerah di Jawa. Gahat, gehat, kahat, taan, pinang (Kalimantan). Alosi; mamaan, nyangan, luhuto, luguto, poko rapo, amongon (Sulawesi). Bua, hua, soi, hualo, hual, soin, palm (Maluku) bua, winu. Sementara dalam bahasa Inggris, pinang biasa dike-

nal sebagai *Betel palm* atau *Betel nut tree*. Nama saintifik bagi pinang ialah *areca catechu*. Dalam bahasa Hindi, buah ini disebut supari dan pan-supari sebagai sirih pinang. Tetapi bahasa Malaya menyebutnya, adakka atau adekka, lalu Sri Lanka menyebutnya puvak, Sementara Thai dan China masing-masing menyebutnya dengan mak dan pin-lang. Pohon pinang dibudidayakan dengan cara menanam biji yang sudah cukup masak. Biasanya biji itu disemai dulu dan kemudian ditanam di dalam beg plastik. Ketika masih kecil tanaman ini cocok dijadikan hiasan dalam pot. Apabila sudah besar, bagus ditanam di luar dan banyak ditanam sebagai batas tanah. Sementara wujud pohon pinang ini juga indah bak peragawati, alias tampak tinggi dan ramping. Batangnya lurus langsing, dapat mencapai ketinggian sekitar 25 meter dengan diameter sekitar 15 cm atau lebih. Tajuknya tidak rimbun. Dan pelepah daun berbentuk tabung dengan panjang 80 cm, tangkai daun pendek; helaian daun panjangnya sampai 80 cm, anak daun 85 x 5 cm, dengan ujung sobek dan bergerigi. Lebih jauh menelisik tentang tongkol bunganya dimana terdapat seludang (*spatha*) yang panjang dan mudah rontok, muncul dibawah daun, panjang lebih kurang 75

Pohon Pinang Menaungi Setra Gandamayit

cm, dengan tangkai pendek bercabang rangkap, sumbu ujung sampai panjang 35 cm, dengan 1 bunga betina pada pangkal, di atasnya dengan banyak bunga jantan tersusun dalam 2 baris yang tertancap dalam alur. Bunga jantan panjang 4 mm, putih kuning; benang sari 6. Bunga betina panjang lebih kurang 1,5 cm, hijau dan bakal buah memiliki ruang 1.

Bentuk buah pinang seperti telur bulat yang terbalik memanjang, merah oranye, panjang 3,5 - 7 cm, dengan dinding buah yang berserabut. Biji 1 berbentuk telur, dan memiliki gambaran seperti bentuk jala ikan. Biji pinang biasa dijadikan masyarakat kita yang gemar menyantap sirih sebagai bahan campuran kapur.

Memang biasanya pinang ini ditanam di pekarangan, di taman atau dibudidaya-

kan. Kadang juga tumbuh liar di tepi sungai dan tempat-tempat lain dan dapat ditemukan dari 1 hingga 1.400 meter di bawah permukaan laut. Selain itu bagian umbut pinang dimakan sebagai lalap atau acar, sedang buahnya merupakan salah satu ramuan untuk makan sirih, dan merupakan tanaman penghasil zat samak. Pelepah daun juga digunakan untuk pembungkus makanan, bahan campuran untuk pembuatan topi, dan masih banyak bentuk dan kegunaan lainnya.

Panjat Pinang

Dan dalam segi ekonomi, bertanam pohon pinang juga sangat menguntungkan. Untuk wilayah lokal, kita sudah lama mengenal pohon pinang sebagai bagian lain dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan setiap tanggal 17 Agustus. Lomba panjat pinang, merupakan kegiatan seru sekaligus menegangkan karena bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga merupakan suatu bentuk perjuangan. Usaha jual beli pohon pinang di masa menjelang perayaan hari bersejarah ini memang sangat menggiurkan. Mengingat perayaan ini digelar hampir di setiap sudut kampung di seluruh Indonesia. Bayangkan saja, berapa batang pohon pinang yang terpaksa ditebang untuk memeriahkan kegiatan tersebut? Dan tentu saja, harga pohon pinang pada periode tersebut bisa mendadak begitu mahal.

Penjualan pohon pinang di dunia pertamanan juga sangat bagus. Sebab pinang biasa ditanam baik di bagian luar maupun di dalam ruangan, sebagai pohon hias atau ornamental. Meski kurang begitu awet, kayu pinang yang tua juga dimanfaatkan untuk bahan perkakas atau pagar. Batang pinang tua yang dibelah dan dibuang tengahnya digunakan untuk membuat talang atau saluran air.

Ekspor Pinang

Ekspor pinang dari Indonesia juga sudah menjalar ke negara-negara Asia selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, atau Nepal. Negara-negara pengekspor pinang utama adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Myanmar.

Biji pinang yang diperdagangkan terutama yang sudah dikeringkan, dalam keadaan utuh (bulat) atau dibelah. Umumnya biji pinang ini akan diolah menjadi semacam permen atau sebagai penganan ringan. ▲



Cacingan Hingga Organ Kewanitaan

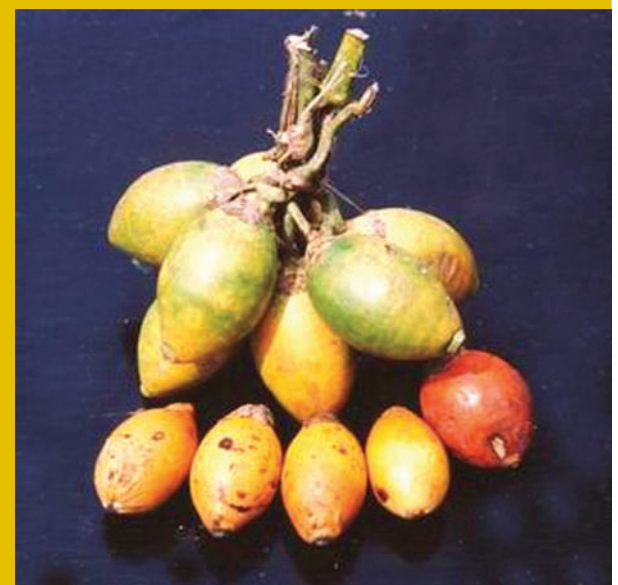
KHASIAT biji pohon pinang dalam dunia kesehatan memang tidak bisa dikesampingkan. Secara tradisional, masyarakat sudah lama mengenal biji pinang untuk mengobati beragam penyakit. Seperti disentri, diare berdarah dan kudis. Dan di masa kini yang semuanya sudah serba moderen, pengobatan dengan menggunakan khasiat biji buah pinang tetap berjalan. Karena memang biji pinang mengandung alkaloida seperti misalnya arekaina (*arecaine*) dan arekolina (*arecoline*), yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif, dapat merangsang otak. Sediaan simplisia biji pinang di apotek biasa digunakan untuk mengobati penyakit cacingan, terutama untuk mengatasi cacing pita.

Tetapi anda harus berhati-hati, karena beberapa macam pinang bijinya menimbulkan rasa pening apabila dikunyah. Zat lain yang dikandung buah ini antara lain *arecaidine*, *arecolidine*, *guracine* (*guacine*), *guvacoline* dan beberapa unsur lainnya. Dan memang, akar pinang jenis *pinang hitam*, pada masa lampau digunakan sebagai bahan pembuat racun untuk menyingkirkan musuh.

Sementara itu, air rebusan dari biji pinang digunakan untuk mengatasi penyakit seperti haid dengan darah berlebihan, hidung berdarah (mimisan), koreng, borok, bisul, eksim, kudis, difteri, cacingan (kremitis, gelang, pita, tambang), mencret dan disentri. Seperti yang dilakukan masyarakat di desa

Semayang Kutai-Kalimantan Timur. Selain itu, pinang digunakan juga untuk mengatasi bengkak karena retensi cairan (edema), rasa penuh di dada, luka, batuk berdarah, diare, terlambat haid, keputihan, beri-beri, malaria, memeperkecil pupil mata. Biji dan kulit biji bagian dalam dapat juga digunakan untuk menguatkan gigi goyah, bersama-sama dengan sirih. Air rendaman biji pinang muda digunakan untuk obat sakit mata bagi warga suku Dayak Kendayan, di kecamatan Air Besar, Kalimantan Barat.

Masyarakat lokal yang menggunakan pinang sebagai pengobatan diantaranya masyarakat Papua. Bagi masyarakat ini, pinang muda digunakan bersama dengan buah sirih untuk menguatkan gigi. Selain sebagai obat penguat gigi,





masyarakat pesisir pantai desa Assai dan Yoon-noni, yang didiami oleh suku Menyeh, Arfak, Biak dan Serui- Papua, biji pinang muda digunakan setelah melahirkan oleh kaum wanita dengan cara memasak buah pinang muda tersebut dan airnya diminum selama satu minggu untuk mengecilkan rahim.

Ada juga yang menggunakan umbut pinang muda digunakan untuk mengobati patah tulang, dan sakit pinggang (salah urat). Dan daunnya untuk mengatasi masalah tidak nafsu makan, dan sakit pinggang. Sabut pinang rasanya hangat dan pahit, digunakan untuk gangguan pencernaan, sembelit dan edema. Jika ditelisk ke dalam, biji pinang yang rasanya pahit, namun agak pedas dan hangat ini memang mengandung sekitar 0,3 hingga 0,6 persen alkaloid, seperti *arekolin* (C₈H₁₃NO₂), *arekolidine*, *arekain*, *guvakolin*, *gvasine* dan *isoguvasine*. Juga terdapat kandungan *red tanin* 15 persen, lemak 14 persen (*palmitic*, *oleic*, *stearic*, *caproic*, *caprylic*, *lauric*, *myristic acid*), kanji dan resin. Dan rupanya, biji segar justru mengandung sekitar 50 persen lebih banyak *alkaloid*.

Diketahui, *arekolin* selain berfungsi sebagai obat cacing juga sebagai penenang, sehingga bersifat memabukkan bagi penggunaannya. Mengingat kandungan kimia tanaman pinang (*alkaloid arekolin*) mengandung racun dan penenang sehingga tidak dianjurkan untuk pemakaian dalam jumlah banyak. Meski demikian, ternyata biji pinang juga mengandung senyawa antioksidan sehingga berpotensi sebagai antikanker.

Pemanfaatan biji buah pinang untuk mencegah dan memberantas ca-



cing di tubuh manusia memang sudah cukup lama dikenal. Pencegahan dan pemberantasan cacing di dalam tubuh ini memang penting dan harus segera dilakukan mengingat bahaya yang akan ditimbulkan. Sebab infeksi cacing usus seperti cacing gelang (*ascaris lumbricoides*), cacing cambuk (*trichuris trichiura*) dan cacing kait (*n.americanus*), terutama pada anak-anak sangat membahayakan.

Sementara infeksi cacing gelang, bila larvanya sampai ke paru-paru bisa membuat orang yang menjadi induk semangnya akan menderita batuk. Kalau yang dewasa sampai bermigrasi ke usus buntu, akibatnya dapat menimbulkan radang usus. Jika migrasinya sampai ke hati, maka terjadi abses hati. Dan perlu diketahui, infeksi cacing cambuk akan menyebabkan nyeri di daerah perut, diare, dan terkadang anus menonjol keluar. Pemberantasan cacing pita (*taenia saginata* atau *t.solium*) yang dapat ditularkan lewat daging sapi atau babi yang dimasak kurang sempurna umpamanya biasanya menggunakan bahan-bahan tradisional. Seperti dengan minum santan kelapa (*cocos nucifera*), kalau bisa kelapa hijau, yang kental. Dosisnya, satu gelas sehari dan diminum pada pagi hari sebelum sarapan. Atau, dengan makan isi biji

waluh (*cucurbita mochata*) sebanyak 500 - 1.000 butir bagi orang dewasa. Dua jam kemudian minum kastrol untuk urus-urus untuk mengeluarkan cacing, meski hal ini sebenarnya dapat membahayakan pencernaan.

Sedangkan untuk mengusir cacing keremi (*oxyuris vermicularis*) dari saluran pencernaan, generasi orang tua atau kakek kita menggunakan satu jari akar pepaya gantung yang dimasak dengan satu gelas air hingga tersisa setengah gelas. Air rebusan ini diminum dengan sedikit susu sapi. Resep tradisional ini diminum dua kali sehari, masing-masing setengah gelas. Dianjurkan selama mengkonsumsi obat alami ini, penderita tidak makan terlalu kenyang. Dan perut penderita ditempli tumbukan bunga pepaya gantung dan dibalut dengan gurita pada malam harinya. Meskipun proses penyembuhannya belum diketahui dengan pasti, resep-resep tradisional macam itu mungkin masih banyak digunakan hingga sekarang. Termasuk juga dengan menggunakan biji buah pinang. Contohnya, *arekolin* yang terkandung dalam pinang merupakan penghapus parasit dan cacing serta bertindak seperti *asetil kolin*. Buah pinang muda dikunyah dan airnya ditelan untuk mengobati kencing darah. Tapi masyarakat Indonesia memang memanfaatkan tanaman ini sebagai obat alami untuk menguatkan gusi, gigi, dan mengobati cacingan.

Bahkan, pinang juga bisa meningkatkan gairah dan stamina tubuh. Ekstrak etanol biji pinang menghambat pertumbuhan dan *proliferasi* alias perkembangan sel kanker payudara.

Daging biji pinang yang diperas mengeluarkan zat *orecoline* yang bersifat *parasimpatomimetik* yang bermanfaat mengeluarkan cacing dari dalam tubuh. Zat taninnya yang tinggi berkhasiat menyembuhkan radang. Daun pinang mengandung kalium yang bermanfaat untuk memperlancar buang air seni, mengeluarkan dahak dan mengecilkan pori-pori. Biji pinang mengandung senyawa tanin dan beberapa *alkaloid* seperti *gvasina*, *guvakolina*, *arekaina*, dan *arekolina*. *Arekolina* ditemukan dalam jumlah terbanyak dan inilah yang diduga berfungsi sebagai *antihelmintik*- anti cacing. ▲

Deflation Says Buy Bonds; Supply Flood Says Sell

The global economy is falling off a cliff, central banks are slashing policy rates, so everyone and her cat should move what's left of their incredible shrinking cash piles into the can't-be-beaten security of government bonds.

Except stocks are as cheap as chips and even managed to rally after last week's Armageddon-like U.S. jobless numbers, so investors should be snapping up equities as fast as their fingers can click the buy button.

Except inflation is deadlier than the collateralized-debt-obligation market, prices of everything from houses to cars to Russian art are collapsing around our ears, and everybody knows you should put your nest egg into fixed-income securities now that deflation is the new black.

Except President-elect Barack Obama is poised to sign a new New Deal, French President Nicolas Sarkozy has set aside \$33 billion for a "Vive la France!" sovereign wealth fund, U.K. Prime Minister Gordon

Brown has belatedly remembered his tax-and-spend-spend-spend roots, and governments everywhere are building roads to nowhere and Bridges of Sighs -- all to be funded by printing stacks and stacks of government bonds.

Confused? So am I.

Record low yields in the U.S. Treasury market and a collapse in borrowing costs for governments around the world suggest investors are nonplussed by the prospect of a flood of freshly minted debt to fund a raft of bailout plans. Those conditions also point to a surge in demand for low-risk assets as banks cut back on leverage -- which is how you get absurdities such as three-month Treasury bills trading at negative yields this week.



Making Money

Betting on bonds has been a winning strategy this year; all of the 26 bond indexes tracked by Bloomberg show fixed-income investors have made money this year. Australian securities led with 18 percent gains and even Hungary's debt market eked out a 1 percent return, the least lucrative.

U.S. Treasuries maturing in one year or more have delivered a total return of almost 12 percent, compared with losses of about 40 percent posted by the Standard & Poor's 500 Index. Those super-sized bond gains were underpinned by the 10-year Treasury yield touching 2.505 percent on Dec. 5, the lowest since at least 1962 when the Federal Reserve's daily records began, and since 1954 on a monthly basis.

Government-bond buyers may be betting the Fed will augment its various rescue packages for the financial markets by directly buying Treasuries to keep borrowing costs at growth-stimulating lows, especially as it runs out of monetary-policy bullets.

Unconventional Techniques

"A combination of a floor to interest rates, the weakness of the economy and a loss of traction between official rates and activity looks set to result in the Fed adopting a set of unconventional monetary policy techniques," Philip Shaw and David Page, economists at Investec Securities in London, wrote in a research report published this week.

Such expectations stem from a speech that Fed Chairman Ben Bernanke made as a central bank governor in November 2002. The Fed could avert deflation by "announcing explicit ceilings for



yields on longer-maturity Treasury debt, say, bonds maturing within the next two years," Bernanke said. "If operating in relatively short-dated Treasury debt proved insufficient, the Fed could also attempt to cap yields of Treasury securities at still longer maturities, say, three to six years."

Earlier this month, Bernanke revisited the topic. When the scope to use interest rates to boost the economy is close to exhaustion, the Fed could buy "longer-term Treasury or agency securities on the open market in substantial quantities," he said. "This approach might influence the yields on these securities, thus helping to spur aggregate demand."

'Practically Zero'

Michael Shaouland Timothy Brackett, analysts at New York-based institutional brokerage Oscar Gruss & Son Inc., warned that investors might be misinterpreting the scope for Fed bond purchases, based on Bernanke's phrasing in 2002.

"He advocated purchasing longer-term Treasuries which he defined as notes of up to two-year maturity," they wrote in a research note last week. "We would therefore judge the possibility of the Fed jumping into the current long-term Treasury market as practically

zero and would expect market participants to realize this sooner or later."

As a cautionary tale, they point out that bondholders last got overexcited about the prospect of Fed Treasury purchases in the first half of 2003. In July of that year, then Chairman Alan Greenspan said the situation was "most unlikely to arise," prompting the biggest one-day jump in the 10-year bond yield in more than seven years.

Virtual Worlds

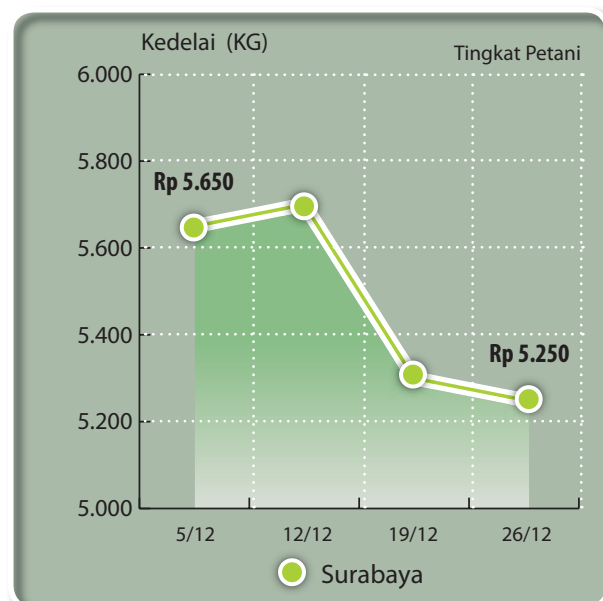
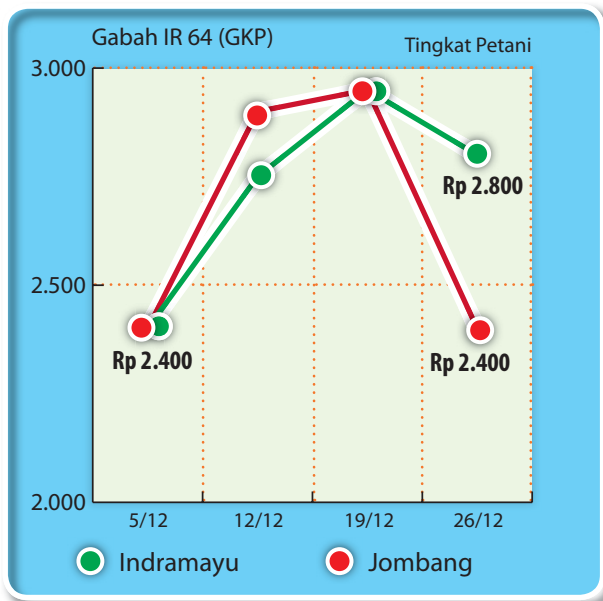
There's an odd mismatch between investor appetite for lending to governments at ever-decreasing interest rates and what prices in the credit-default swap market are suggesting about the consequences of economic pump-priming and ballooning deficits.

The cost of buying protection against deteriorating government creditworthiness is surging for every nation; five-year swaps on the U.S., for example, trade at about 66 basis points, a sixfold increase in six months. Corresponding swaps on the U.K. have leaped to 120 basis points from about 17 basis points in August, while Italy traded at 200 basis points last week, up from 40 basis points three months ago.

It may be that the market is so broken that default swaps can't distinguish noise from signal. Still, record skepticism about government creditworthiness is incongruous with all-time lows for yields. Until that discrepancy with the virtual world of derivatives is explained, maybe investors should avoid driving yields on cash bonds lower. ▲

**) Mark Gilbert is a Bloomberg News columnist. The opinions expressed are his own.*

▶ TRANSAKSI ◀



Sebenarnya, BBJ memiliki tiga program pamungkas untuk selalu diprioritaskan setiap tahun. Hanya saja, ibarat sebilah pedang, program ini perlu terus diasah agar tajam dan juga rutin dilakukan perbaikan. Tentu saja ini demi meningkatkan kuantitas transaksi serta kinerja bursa.

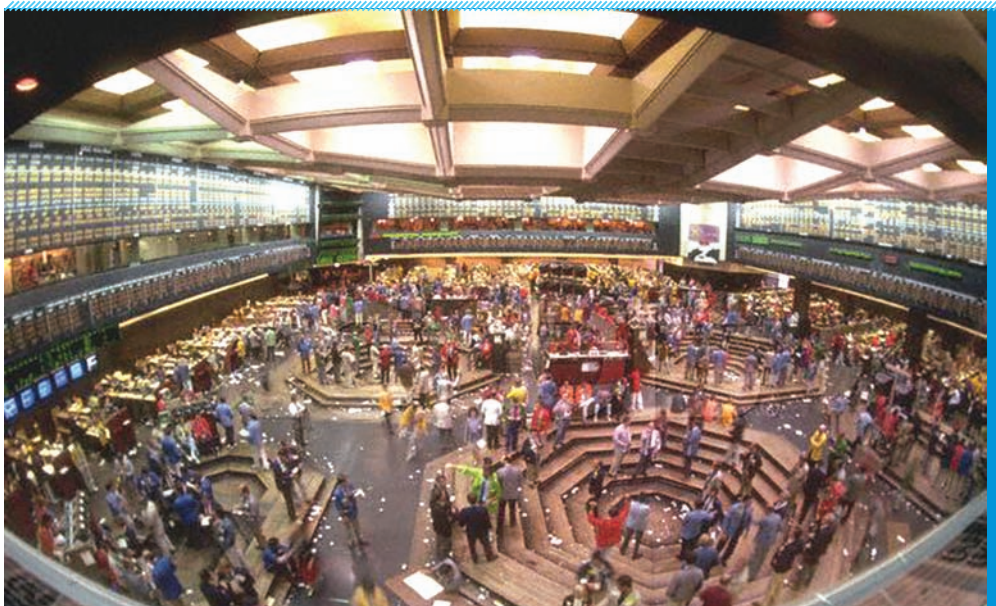
Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Hasan Zein Mahmud, mengatakan, tiga program utama BBJ tahun 2009 ini berupa, peningkatan likuiditas transaksi produk multilateral yang ditransaksikan di bursa, memperbaiki mekanisme Sistem Perdagangan Alternative (SPA) yang merupakan bagian transaksi bilateral dan melaksanakan perdagangan pasar fisik.

Lebih jauh dijelaskan Hasan Zein, aturan SPA akan diperbaiki demi menjamin transparansi harga dan transaksi sehingga mampu lebih jauh melindungi nasabah. Maraknya kasus pelanggaran yang dilakukan perusahaan pialang berjangka selama ini, telah diatasi dengan tegas oleh BBJ.

"Terbukti, pembekuan SPAB- Surat Persetujuan Anggota Bursa, sampai pencabutan surat izin sudah beberapa kali dilakukan," tegas Hasan.

Sejak pertengahan Desember 2008, lalu, BBJ juga telah memeriksa satu pelaku pasar perdagangan berjangka. Dan telah pula dijatuhkan sanksi berupa pencabutan SPAB. Pelaku pasar itu yakni PT Master International Investment (MII).

Program Penting



Hasan Zein, menuturkan, setelah habis tenggang waktu yang diberikan kepada perusahaan tersebut untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, Tim Pemeriksa BBJ menemukan bahwa MII terbukti melanggar peraturan. Antara lain, secara umum tidak memenuhi langkah-langkah perbaikan hal mana tercermin dengan adanya pemutusan kerjasama dari satu-satunya pialang peserta yang masih aktif di masa pengenaan sanksi, peringatan keras yang berakibat bahwa MII saat ini tidak lagi memiliki pialang peserta dan MII juga tidak kooperatif dalam kegiatan monitoring dari Tim Audit BBJ dan KBI.

Sebagai anggota bursa yang bertindak sebagai Pedagang Penyelenggara SPA, dalam kegiatan pemeriksaan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Tertib Bursa (PTT Bursa) Bab 5 Penegakan Peraturan Pasal 505 ayat 2 butir f & g, dan Bab 6 tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Berdasarkan ketentuan ini, MII tidak dapat menyediakan sebagian data audit yang sedianya dapat diperoleh dari sistem perdagangan, tidak memberikan kuota harga atas sistem perdagangan

dan tidak melakukan pendaftaran transaksi ke sistem registrasi bursa secara real-time.

Di samping itu, MII juga terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Kepala Bappebti No.55/Bappebti/KP/I/2005, juncto SK No. 58/Bappebti/Per/VII/2006, pasal 3 ayat 1 butir c. dan d. Dan berdasarkan peraturan ini MII pun terbukti tidak memenuhi kecukupan jumlah peserta SPA. Berdasarkan ketentuan penyelenggaraan SPA harus memiliki yakni 3 peserta SPA. Selain itu, MII juga tidak memiliki sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan.

Pada pelaksanaan pemeriksaan, juga ditemui adanya ketidakjelasan keterangan dari manajemen MII berkaitan dengan kepemilikan serta hak dan kewajiban atas sistem perdagangan. Oleh karena itu, MII sebagai penyelenggara sistem perdagangan alternatif telah gagal mendeteksi adanya sejumlah penyimpangan dan pelanggaran transaksi dari pialang pesertanya. Dan dari hasil pemeriksaan Tim Audit Gabungan BBJ dan KBI, terdapat transaksi dari nasabah PT Graha Finesa

BBJ 2009

Berjangka (salah satu Pialang Peserta PT MII) yang terjadi diluar waktu/sesi perdagangan yang ditetapkan dan harga transaksi diluar rentang harga batas atas dan batas bawah.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan itu, BBJ telah menghimbau para investor yang terkait dengan MII untuk memonitor status dan proses penyelesaian posisi terbuka serta rekening masing-masing untuk transaksi yang dilakukan melalui para pialang berjangka yang tergabung dalam cluster MII.

13 Perusahaan

Bukan hanya MII yang dihajar ketegasan BBJ. Sebanyak 13 perusahaan juga di depak BBJ akibat nekad melanggar ketentuan dari batas waktu yang telah ditetapkan untuk mengajukan hak keanggotaan. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya PT Capital & Gain Futures, PT Hall Rich Indonesia, PT Harumdana International, PT Indo Arthamas Makmur, PT Janisia Investama, PT Masterindo Perdana Jaya, PT Menara Mas Investindo, PT Muliadana Futures, PT Panmitra Utama, PT Penata Artha Futures, PT Gita Artha Berjangka, PT Central Asset Futures dan PT Sarana Perdana Berjangka.

Hasan Zein Mahmud juga mengungkapkan, sebelum mencabut surat persetujuan anggota bursa bagi 13 perusahaan tersebut, BBJ sebenarnya telah menerbitkan surat edaran pada 24 September 2008. Surat tersebut memuat tentang kewajiban setiap anggota bursa untuk memiliki sekurang-kurangnya satu hak keanggotaan, kecuali bagi perusahaan pedagang perorangan dapat memiliki atau menyewa satu hak keanggotaan. Dan masa tenggang waktu pun telah diberikan sampai 31 Desember 2008 karena ada pertimbangan, sebagian

anggota bursa yang mengajukan permohonan perpanjangan.

Tetapi sayangnya, lagi-lagi ketentuan ini enggan dipenuhi sehingga BBJ terpaksa memberikan sanksi berupa pencabutan keanggotaan. Langkah tegas BBJ ini tentu bukan yang pertama. Sebab sebelumnya, pencabutan persetujuan keanggotaan juga dilakukan kepada PT Graha Finesa Berjangka, Cayman Trust Futures, Quantum Futures, Artha Berjangka Nusantara, Fortune Channel Futures dan Dea-U Trade.

Single Platform

Selain memperbaiki mekanisme SPA, BBJ juga menargetkan penerapan single platform (sistem perdagangan tunggal) untuk sistem perdagangan alternatif (SPA) mulai Juli 2009. Penggunaan *single platform* ini diharapkan dapat mengurangi berbagai pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka anggota BBJ.

Hasan menyatakan pihaknya masih mencoba mencari sistem perdagangan yang tepat untuk penerapan single platform SPA ini. Dan penerapannya sesuai dengan arahan

badan pengawas untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan berinvestasi bagi investor.

Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) merupakan perdagangan di luar bursa (*over the counter*) yang mentransaksikan kontrak indeks saham asing seperti Indeks Hong Kong, Indeks Jepang, serta kontrak valuta asing seperti poundsterling terhadap dolar AS, yen terhadap dolar AS. Transaksi selama ini terjadi bilateral antara pedagang dan nasabah

melalui pialang berjangka anggota BBJ. Selanjutnya pialang tinggal melapor ke BBJ mengenai transaksi nasabahnya. Sistem transaksi yang di-

gunakan saat ini untuk SPA memakai sistem yang disediakan perusahaan pialang masing-masing. Akibatnya, banyak nasabah yang mengadu ke BBJ dan Bappebti karena sistem transaksi di pialang itu dinilai terkadang merugikan nasabah.

Dengan penerapan single platform SPA ini, BBJ yang menyediakan sistem perdagangan, selanjutnya seluruh pialang berjangka anggota bursa menyelaraskan sistemnya yang sudah ada.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) I Gede Raka Tantra menyambut baik rencana BBJ menerapkan single platform SPA. Dia menilai rencana tersebut sangat bagus, karena dapat mengontrol kejadian transaksi dan mengetahui *segregate account* (rekening terpisah) oleh BBJ dan Bappebti. Penyeragaman sistem transaksi SPA ini juga tidak akan mempengaruhi minat investor untuk terus berinvestasi pada instrument berjangka dalam SPA.

Kakao

Selain itu, Hasan Zen Mahmud juga menyinggung tentang komitmen pihaknya mengenai peluncuran kontrak kakao di awal 2009, yang merupakan bagian dari upaya peningkatan likuiditas di bursa melalui penawaran ragam kontrak. Dalam waktu dekat BBJ juga akan memperoleh hasil kajian dari konsultan dalam negeri mengenai kemungkinan kelayakan peluncuran kontrak kakao tersebut.

Dan sebelumnya, untuk meningkatkan kemampuan sistem JAFETS 2, BBJ juga telah mempersiapkan dana sekitar Rp 10 miliar untuk pengadaan sistem transaksi multilateral di 2009. Meski dana tersebut terbilang terbatas, namun BBJ berharap dapat meningkatkan transaksi di bursa agar dapat diakses semua pihak secara *online*. ▲

Ekonomi Kreatif

Gelombang Perekonomian Masa Depan

Kekuatan yang menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota dan daerah.

Tahun 2009 ini ditandai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Tahun Indonesia Kreatif (TIK). Bagi pemerintah, pencaanangan Tahun Indonesia Kreatif 2009 menjadi momentum mengembangkan ekonomi gelombang ke-empat yang berprospek tinggi ditengah ancaman krisis global. Pencaanangan itu merupakan tindak lanjut diselenggarakannya Bulan Indonesia Kreatif pada Agustus 2008, lalu.

Perhelatan sukses Bulan Indonesia Kreatif yang digagas Departemen Perdagangan dengan sejumlah komunitas di Jakarta, Yogyakarta dan Bali, itu, adalah menggali dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Kegiatan itu juga menandai gerakan 100 tahun kebangkitan Nasional.

Seiring dengan pencaanangan presiden itu, maka belakangan ini di tengah masyarakat semakin santer terdengar ekonomi kreatif. Apa sesungguhnya ekonomi kreatif itu? Namun sebelum membahas tentang ekonomi kreatif itu, ada baiknya ditelusuri gagasan besar dibaliknya.

Sekitar awal tahun 2006, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, juga pernah meluncurkan program nyaris serupa, yakni Indonesia Desing Power. Program ini berupaya menundangi pihak-pihak yang ingin serius terjun di bidang desing kreatif, terutama dari kalangan generasi muda. Di sisi lain, program itu ditujukan meningkatkan kreatifitas industri-industri berbasis kreatif agar lebih berperan pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Serta dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik atau pun di pasar ekspor.

Harapan itu sesungguhnya tidak isapan jempol belaka. Berdasarkan data yang dilansir Departemen Perdagangan, industri kreatif pada 2006 menyumbang Rp 104,4 triliun. Atau rata-rata 4,75 persen terhadap PDB nasional selama 2002-2006. Jumlah ini melebihi sumbangan sektor listrik, gas dan air bersih. Tiga subsektor dari industri kreatif yang memberikan kontribusi paling besar pada PDB itu adalah fashion sebesar 30 persen, kerajinan 23 persen dan periklanan 18 persen.

Dari sisi ekspor, sektor ini memang masih berperan kecil menyumbang devisa. Tahun 2006, industri kreatif hanya



mencatatkan ekspor sebesar 7 persen. Sekerdar ilustrasi, di negara-negara lain, seperti Korsel, Inggris dan Singapura, sektor ini mampu menyumbang devisa pada negara bersangkutan dengan rata-rata di atas 30 persen.

Meski berperan kecil pada penghasilan devisa, industri kreatif merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2007, sektor ini mampu menyerap 4,5 persen atau sekitar 5 juta tenaga kerja baru dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,6 persen. Penyerapan tenaga kerja sebesar itu, jauh melebihi tingkat pertumbuhan tenaga kerja nasional yang hanya sebesar 0,54 persen. Industri kerajinan tumbuh 19,5 persen dengan total US\$ 620 juta atau setara Rp 6 triliun. Untuk perhiasan, menyumbang 36,6 persen dengan nilai US\$ 953 juta atau lebih dari Rp 9 triliun.

Kata Pakar

Jadi apa sesungguhnya ekonomi kreatif itu? Dari berbagai literature dan ulasan para ekonom, secara sederhana ekonomi kreatif dapat dikatakan kegiatan ekonomi dimana input dan output-nya merupakan gagasan. Sebagai contoh, seorang pencipta lagu menciptakan lagu yang disukai masyarakat. Dengan disukainya lagu-lagu tersebut, berkembang pula usaha lain, seperti belakangan ini maraknya festival musik, ajang kompetisi musik, munculnya penyanyi baru, besarnya kebutuhan alat-alat musik dan seterusnya.

Contoh lain yang menarik dari pengertian itu, misalnya, sekitar tahun 2007, lalu, masih melekat pada ingatan kita fenomena tanaman anthurium. Dari sebuah tanaman yang sederhana, dihasilkan sejumlah uang yang sangat besar. Sebuah tanaman anthurium bisa mencapai jutaan rupiah. Dan dampaknya, usaha tanaman bisa menjadi usaha yang menjanjikan keuntungan besar khususnya di wilayah perkotaan.

Dari disiplin ilmu, ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan John Howkins, melalui bukunya *"The Creative Economy: How People Make Money from Ideas"*, diterbitkan oleh Penguin, tahun 2001. Menurut pria berkebangsaan Inggris, ini, *ekonomi kreatif*

adalah analisis komprehensif mengenai ekonomi baru berdasarkan *creative people, creative industry dan creative city*.

Selain itu ada juga penggagas ekonomi kreatif lainnya, seperti Dr. Richard Florida, pada bukunya berjudul *"The Rise of Creative Class"* dan *"Cities and the Creative Class"*, menyebutkan; *seluruh umat manusia adalah kreatif, apakah ia seorang pekerja di pabrik kaca atau seorang remaja digang senggol yang sedang membuat musik hip-hop. Namun perbedaannya adalah pada statusnya (kelasnya), karena ada individu-individu yang secara khusus bergelut dibidang kreatif (dan mendapat faedah ekonomi secara langsung dari aktivitas tersebut). Tempat-tempat dan kota-kota yang mampu menciptakan produk-produk baru yang inovatif tercepat akan menjadi pemenang kompetisi di era ekonomi ini.*

Senada dengan itu, pemenang Nobel tahun 1995, Robert Lucas, mengatakan, ekonomi kreatif adalah *kekuatan yang menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari tingkat produktifitas klaster orang-orang bertalenta dan orang-orang kreatif yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya.*

Menyimak pendapat para tokoh dunia tersebut, jadi jelas sudah apa yang dimaksud ekonomi kreatif. Yakni, menciptakan segala sesuatunya dimulai dari hal sederhana yang merupakan pemuasan kebutuhan manusia.

Karena adanya faktor pemuasan kebutuhan itu, maka segala sesuatu yang diciptakan melalui kreatifitas ditukarkan dengan uang.

Gelombang Ke-empat

Lalu, mengapa ekonomi kreatif itu belakangan ini menjadi demikian populer? Dan, bahkan banyak kalangan mengatakan ekonomi kreatif itu sebagai ekonomi gelombang ke-empat.

Tentunya ada yang mendasari, yakni terjadinya perubahan kebutuhan manusia dari masa ke masa yang tidak mungkin kembali masa semula dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.

Sederhananya, pendapat ini bisa diargumentasikan dengan seorang petani tidak akan mau membajak sawahnya dengan tangan hampa sementara didepannya ada sebuah mesin pembajak. Artinya, kemajuan teknologi dari hasil keratifitas manusia dimanfaatkan untuk kepentingan dan kepuasan manusia itu sendiri.

Dari penalaran itulah para pintar-pandai mengklasifikasikan peradapan manusia berdasarkan kebutuhan. Adalah Alvin Toffler, penulis terkenal Amerika, dalam bukunya *The Third Wave*, 1980, menjelaskan tiga jenis masyarakat berdasarkan konsep gelombang. Gelombang pertama adalah abad pertanian. Gelombang kedua adalah abad industri dan gelombang ketiga adalah abad informasi.

Merujuk pada pemikiran Alvin Toffler, itu, saat ini kita berada pada gelombang ketiga. Di mana teknologi informasi demikian dekat dengan kebutuhan hidup kita. Dan berdasarkan gagasan Alvin Toffler, itu, muncul pula pemikiran yang lebih maju, bahwa nantinya akan ada pula gelombang ke-empat, itulah yang disebut ekonomi kreatif. Pemikiran

ini bukannya tidak berdasar, mari kita lihat di beberapa negara maju ekonomi kreatif berperan signifikan dalam menyumbang perekonomian. Di Inggris, sector ekonomi kreatif tumbuh rata-rata 9 persen per tahun. Melebihi rata-rata perkumbuhan ekonomi negara sepakbola itu, yang hanya berkisar 2 – 3 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kreatif 9 persen, sektor ini berkontribusi pada pendapatan nasional- Inggris, mencapai US\$ 12,6 miliar. Dan sektor ekonomi kreatif menjadi sumber penghasilan kedua terbesar bagi Inggris setelah sektor keuangan.

Keberhasilan sektor ekonomi kreatif itulah yang menjadikan Inggris sebagai Negara pelopor ekonomi kreatif.

Korea Selatan, industri ekonomi kreatif tumbuh sejak 2005 menyumbang lebih besar daripada manufaktur. Demikian pula dengan Singapura, ekonomi kreatif menyumbang 5 persen terhadap PDB atau US\$ 5,2 miliar.

Jadi, melihat pentingnya peran ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, bagi Indonesia tidak ada salahnya untuk mengembangkan. Apa lagi, sektor ini paling berpeluang menyedot lapangan kerja terbesar. Dan menekan angka kemiskinan.

14 Sub-Sektor

Setelah melalui pembahasan yang panjang, Departemen Perdagangan, telah menyusun sub-sektor ekonomi kreatif yang akan dikembangkan pada tahun 2009 hingga 2025. Ekonomi kreatif yang dikembangkan Depdag, itu, melingkupi sebanyak 14 sub-sektor yakni sub sektor ekonomi kreatif, yaitu arsitektur; periklanan; desain; fesyen; video, film dan fotografi; pasar seni dan barang antik; penerbitan dan percetakan, layanan computer dan piranti lunak; permainan interaktif; kerajinan; musik; televisi dan radio; seni pertunjukan; penelitian dan pengembangan.

Tahun 2009, secara lebih luas pemerintah juga sudah masuk pada tahap implementasi cetak biru ekonomi kreatif. Dimulai dengan program aksi yang terkoordinasi dari masing-masing instansi pemerintah terkait seuai arahan presiden. Beberapa kegiatan TIK 2009 yang berlangsung dari bulan Januari sampai Desember 2009, telah dibukukan dalam *Calender of Event TIK 2009*.

Hingga saat ini telah tercatat 72 rangkaian kegiatan, namun dalam perjalanannya nanti akan bersifat dinamis dan kalender akan diperbaharui secara reguler. Diantara kegiatan yang tercatat, antara lain, festival film, fesyen dan musik, seminar- konvensi, penghargaan terhadap insan-insan penggerak ekonomi kreatif, karnaval, serta seni pertunjukan (*art performance*) tentang ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh *triple helix*, yaitu pemerintah, intelektual, dan pelaku bisnis maupun komunitas.

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Jakarta dan beberapa daerah seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, Sulawesi Utara dan didaerah-daerah lainnya.

Nah, anda mau memasuki gelombang ke-empat peradapan manusia yang ditandai dengan ekonomi kreatif? Pilihlah salah satu sub-sektor ekonomi kreatif yang dirancang Depdag. Dan, yang jelas, kreatifitas tidak ada matinya! ▲

*) Eddy SL Purba

SRG Peluang dan Tantangan Bagi Bisnis Perbankan

Ano Kurniadi *)

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, diatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kelembagaan

Berdasarkan undang-undang, kelembagaan yang terkait dengan penerbitan resi gudang terdiri dari; Badan Pengawas. Unit organisasi ini di bawah menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang. Badan Pengawas mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi.

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha perdagangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang beserta berwenang menerbitkan resi gudang.

Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi.

Sedangkan Pusat Registrasi yakni badan usaha berbadan hukum yang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang tanggal 14 Juli 2006, adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sedangkan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penata usahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindah bukuan kepemilikan pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Resi Gudang Sebagai Agunan Kredit

Agunan yang ideal menurut undang-undang No. 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2004, yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. UU No. 9 Tahun 2006, penjelasan pasal 2 ayat 2 (1): sebagai bukti kepemilikan, resi gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena dijamin dengan komoditas tertentu dalam penguasaan pengelola gudang yang terakreditasi.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang, Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah hak jaminan pada pesi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.

Setiap Resi gudang yang diterbit-

kan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Resi gudang yang dapat diterima sebagai jaminan kredit adalah resi gudang yang telah tercatat di Pusat Registrasi.

Resi Gudang tersebut harus diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah mendapat persetujuan sebagai Pengelola Gudang oleh Badan Pengawas. Pembebanan Hak jaminan harus dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian hak jaminan.

Dua hal yang dapat menyebabkan hapusnya hak jaminan yaitu hapusnya utang pokok dan pelepasan Hak jaminan oleh penerima.

Provision untuk Kredit

Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 : Resi gudang sebagai agunan kredit dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva (PPA).

70 % (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 50 % (lima puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan; 30 % (tiga puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bu-



lan; 0 % (nol perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Jenis Komoditas

Barang yang dapat dibiayai kredit dengan jaminan resi gudang saat ini yakni, gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput Laut

Untuk selanjutnya jenis barang lain yang dapat dibiayai dengan jaminan resi gudang mengacu pada peraturan menteri atau ketentuan terkait

Pertumbuhan produk kuartal I/2008 sebesar 6 %. Nilai ekspor periode Jan-Juni 2008 mencapai USD 2.37 miliar atau tumbuh sekitar 50,13 % dibanding periode yang sama tahun 2007. Tenaga kerja sebanyak 42,6 juta orang atau 39,40 % dari total tenaga kerja secara nasional.

Produksi padi pada tahun mencapai 57,07 juta ton, gabah kering giling, kedele 608,3 ribu ton, jagung 13,28 juta ton, kelapa sawit 16,8 juta ton, karet 2,6 juta ton, kopi 570,7 ribu ton, kakao 841,68 ribu ton, kelapa 3,22 juta ton, dan tebu 2,3 juta ton.

Peluang

Mengoptimalkan *risk-return trade off* pelayanan kredit komersial sektor pertanian, sektor pertanian mempunyai potensi ekonomi yang tinggi namun dilain pihak dengan melihat

pengalaman masa lalu dianggap berisiko tinggi. Ketersediaan agunan sebagai alternative mitigasi risiko bagi pengusaha kecil termasuk petani sering menjadi kendala dalam akses pendanaan. Sistem resi gudang diharapkan menjadi jalan keluar dalam masalah ini.

Kepraktisan dalam transaksi bank hanya *deal* dengan dokumen. Keberadaan barang secara kuantitas dan kualitas dijamin oleh Pengelola Gudang yang mempunyai kewenangan menerbitkan resi gudang. Pengikatan agunan cukup dibuat Akta Perjanjian Hak Jaminan.

Produktifitas pinjaman dapat relatif lebih tinggi karena kredit jangka pendek sehingga *turn over* dari *loan-able fund* lebih cepat dan didukung dengan biaya PPA yang bervariasi.

Bank dapat menjadi penghubung antara debitur pengusaha besar (pabrik) dengan petani pemasok bahan baku dalam sebuah skema kredit yang bersifat *closed system*.

Bank dapat menciptakan *costumer base* dengan memberikan kredit dengan jaminan Resi Gudang kepada petani.

Tantangan

Skala ekonomi kuantitas komoditas per petani relatif kecil sehingga untuk dapat memanfaatkan sistem resi gudang biayanya terlalu tinggi. Seain itu, pemahaman masyarakat atas Undang-undang No. 9/2006 tentang resi gudang masih rendah. Kredibilitas sistem belum teruji. Resi gudang adalah surat berharga yang merupakan *output* dari sebuah sistem sangat tergantung kepada kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditentukan. Aksebilitas petani terhadap lembaga-

lembaga yang terlibat dalam sistem resi gudang terutama Pengelola Gudang perlu diperluas.

Saran

Undang-undang tentang sistem resi gudang merupakan terobosan baru yang melegitimasi lahirnya lembaga jaminan baru yang disebut hak jaminan. Ditinjau dari aspek hukum maupun ekonomi, resi gudang dapat diterima sebagai agunan ideal

Sektor pertanian dapat dijadikan salah satu pasar sasaran dalam ekspansi kredit ritel komersial dengan agunan resi gudang. *Inherent Risk* yang harus diantisipasi dalam pelayanan kredit dengan agunan resi gudang meliputi infrastruktur, keabsahan resi gudang, dan kualitas serta volatilitas harga komoditi.

Agar ditetapkan target yang terukur yang menjadi indikator *early success* atau *quick win* dari implementasi sistem resi gudang, misalnya jumlah petani atau kelompok tani yang berpartisipasi pada tahun I, II, dan seterusnya.

Diperlukan dukungan infrastruktur (SDM, Gudang) dan *information technology* (IT) yang memenuhi standar *best practice* dan menjadi prasyarat *rollout* Sistem Resi Gudang. Sebelum dilakukan kegiatan pemasaran secara terbuka, perlu terlebih dahulu dilakukan *internal marketing* kepada seluruh jajaran lembaga yang terlibat untuk mendapatkan pemahaman yang sama. ▲

*) Kepala Divisi Administrasi Kredit, BRI, disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang: "Pengembangan Alternatif Pembiayaan Komoditas Melalui Sistem Resi Gudang", Hotel Borobudur, 4 November 2008, Jakarta.



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SRG

Bikin Untung Petani Gede!



Dipersembahkan:
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti)